



Perempuan, Alam, dan Jalan Perubahan

Ketika Perempuan Memimpin di Tengah Krisis Iklim

Pengalaman Lapangan Program EmPower II Konsorsium Women Research Institute 2026



PEREMPUAN, ALAM, DAN JALAN PERUBAHAN
Ketika Perempuan Memimpin di Tengah Krisis Iklim

Pengalaman Lapangan Program EmPower II
Konsorsium Women Research Institute

2026

Ucapan Terima Kasih

Buku ini berangkat dari suara-suara yang kerap tidak terdengar. Dari perempuan-perempuan yang setiap hari berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bersih, yang memikul beban krisis iklim di tubuh dan ruang hidup mereka, sekaligus menemukan cara untuk bertahan, merawat, dan memimpin perubahan. Kisah Warih di Dasan Geria, Matildis di Manggarai Barat, Monika di Lalong, dan banyak perempuan lain yang hadir dalam halaman-halaman buku ini, mengingatkan kami bahwa pengetahuan tentang krisis iklim tidak hanya lahir dari ruang rapat atau dokumen kebijakan, tetapi tumbuh dari pengalaman hidup yang dijalani dengan keberanian dan ketekunan.

Buku Perempuan, Alam, dan Jalan Perubahan: Ketika Perempuan Memimpin di Tengah Krisis Iklim disusun sebagai upaya kolektif untuk membawa pengalaman dan narasi perempuan dari pinggiran ke pusat. Ia bukan sekadar dokumentasi dari program, melainkan ruang bersama untuk merekam, merawat, dan mengakui kepemimpinan perempuan dalam merespons krisis iklim. Kepemimpinan yang hadir dalam sunyi, lahir tanpa sorotan, tetapi berdampak nyata bagi komunitas dan lingkungan di sekitarnya.

Women Research Institute (WRI) menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada UN Women atas kemitraan yang terjalin dalam pelaksanaan Program EmPower II di Indonesia. Kemitraan ini membuka ruang penting bagi pengalaman perempuan di tingkat tapak untuk didengar, diakui, dan dihubungkan dengan proses kebijakan yang lebih luas. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss atas dukungan sumber daya yang memungkinkan praktik-praktik kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim tidak hanya bisa dilakukan, tetapi juga terdokumentasi dan

dipelajari bersama melalui buku ini. Terima kasih kami haturkan kepada seluruh anggota Konsorsium Women Research Institute: Gema Alam di Nusa Tenggara Barat, Yayasan Komodo Indonesia Lestari (Yakines) di Nusa Tenggara Timur, dan Aceh Climate Change Initiative di Aceh. Kerja-kerja pendampingan yang dilakukan dengan kesabaran, keberpihakan, dan kepekaan konteks lokal telah memungkinkan perempuan di komunitas dampingan untuk mengolah pengalaman hidup mereka menjadi pengetahuan, aksi kolektif, dan kepemimpinan yang bermakna. Basis data responsif gender yang dikembangkan, ruang belajar yang dibuka, serta praktik-praktik adaptasi dan mitigasi yang dirawat bersama menjadi fondasi penting bagi perubahan yang lebih adil.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, perangkat desa, serta para pemangku kepentingan di wilayah dampingan Program EmPower II yang telah membuka ruang dialog dan kolaborasi. Namun, rasa terima kasih yang paling utama kami tujukan kepada para perempuan dan komunitas desa yang dengan kerelaan berbagi cerita, waktu, dan pengetahuan mereka. Tanpa keberanian untuk bersuara dan berbagi pengalaman, buku ini tidak akan pernah ada.

Akhir kata, buku ini kami persembahkan sebagai penghormatan bagi perempuan yang setiap hari merawat kehidupan di tengah krisis iklim. Semoga halaman-halaman ini tidak hanya dibaca sebagai laporan atau kajian, tetapi juga dirasakan sebagai pengingat bahwa jalan perubahan sedang, dan telah, dibuka oleh perempuan.

Women Research Institute
Januari 2026

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	3
Tentang Konsorsium Women Research Institute.....	6
Daftar Singkatan	8
Pendahuluan.....	10
Permasalahan Perempuan dalam Perubahan Iklim dan Kaitannya dengan Urgensi Implementasi RAN GPI.....	10
Berangkat dari Pengalaman Lapangan: Perempuan, Alam, dan Jalan Perubahan	11
Kepemimpinan Perempuan dalam Keadilan Iklim	13
Mengungkap Tabir Narasi Kepemimpinan Perempuan Mengatasi Krisis Iklim.....	16
Solusi pada Dampak Perubahan Iklim 1: Kelangkaan dan Menurunnya Kualitas Air	17
Mengadakan Air Melalui Sumur Bor dan Pompa Air Tenaga Surya	17
Konservasi Mata Air.....	20
Solusi pada Dampak Perubahan Iklim 2: Persoalan Limbah dan Menurunnya Produksi Bahan Pangan	23
Mengelola sampah dan limbah menjadi pupuk organik.....	23
Bank Benih Lokal Komunitas Desa Lalong dan Desa Golo Lewe	28
Solusi pada Dampak Perubahan Iklim 3: Menurunnya Sumber Ekonomi	30
Memperkuat kapasitas ekonomi melalui produksi gula aren.....	31
Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP): Penguatan ekonomi kolektif.....	32
REFLEKSI: Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim	34
Membaca Dampak Perubahan Iklim melalui Baseline Data Responsif Gender:	36
Pembelajaran dari Pengalaman Aceh	36
Mengapa Baseline Data Responsif Gender Menjadi Penting	36
Apa yang Ditunjukkan oleh Temuan Baseline Data.....	38
Apa yang Bisa Dilakukan dengan Baseline Data.....	40
Data ini bukan akhir, tetapi titik awal perubahan	40
Dari Pengalaman Lapangan menuju Ruang Dialog Kebijakan	42
Pentingnya kebijakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI)	44
Tinjauan Sosiologis Perempuan dan Perubahan Iklim	44
Ketidaksetaraan Struktural.....	44
Dampak Sosial-Ekonomi	44
Kerentanan Multidimensi	45
Panas Ekstrem sebagai Risiko Sosial Baru	46
Perempuan sebagai Agen Perubahan.....	46
Menjawab Tantangan RAN GPI: Dari Kelembagaan hingga Kepastian Hukum	47

Tantangan RAN GPI di Tataran Kebijakan dan Kelembagaan	48
Tantangan RAN GPI pada Pengetahuan, Data, dan Budaya	48
Penguatan Kerangka Regulasi: Dari Kebijakan ke Kepastian Hukum.....	48
Dukungan Pendanaan dan Tata Kelola yang Responsif Gender	49
Modal Sosial dan Komitmen Internasional sebagai Penguat	49
Praktik Baik Negara Lain	50
Kerangka Monitoring, Evaluation, Learning (MEL) Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim	51
Di Balik Angka Statistik Ada Manusia Nyata.....	51
RAN-GPI: Peluang untuk Perubahan Transformatif.....	52
Skala Besar Membawa Kompleksitas.....	52
Data dan Monitoring Evaluation and Learning (MEL).....	53
Qualitative Impact Protocol (QuIP) untuk RAN-GPI.....	53
Domain Dampak dan Sektor RAN-GPI	54
Refleksi Temu Nasional: Pentingnya Transformasi Ekonomi, Kolaborasi, dan Sistem Pembiayaan untuk Keadilan Iklim.....	56
1. Ekonomi sebagai Landasan Aksi Iklim dan Kepemimpinan Perempuan.....	57
2. Kolaborasi sebagai Jembatan antara Praktik Lokal dan Perubahan Sistemik.....	61
3. Sistem Pembiayaan Inklusif dan Berbasis Komunitas sebagai Dasar Keberlanjutan...	64
Penutup	69

Tentang Konsorsium Women Research Institute

Program **EmPower II** dijalankan melalui **Konsorsium Women Research Institute**, sebuah kolaborasi antara organisasi riset, organisasi masyarakat sipil, dan institusi akademik yang memiliki pengalaman panjang dalam isu gender, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Konsorsium ini dibangun atas kesadaran bahwa krisis iklim tidak dapat direspons secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan lintas disiplin dan lintas wilayah, dengan menempatkan perempuan sebagai aktor utama perubahan.

Sebagai **Lead Consortium, Women Research Institute (WRI)** berperan dalam merancang kerangka konseptual program, mengoordinasikan pelaksanaan lintas wilayah, serta menghubungkan pengalaman lapangan dengan advokasi kebijakan di tingkat nasional. WRI memastikan bahwa riset, pendampingan komunitas, dan dialog kebijakan berjalan secara terintegrasi, sehingga pengalaman perempuan di tingkat tapak dapat menjadi dasar pengetahuan dan rekomendasi kebijakan, termasuk dalam penguatan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI).

Di tingkat lokal, **Gema Alam NTB** mendampingi kelompok perempuan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, dalam merespons dampak perubahan iklim melalui pengelolaan

air, limbah, pangan, dan energi berbasis komunitas. Pengalaman panjang Gema Alam dalam kerja lingkungan memastikan intervensi program berakar kuat pada konteks sosial-ekologis setempat serta mendorong tumbuhnya kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

Di Nusa Tenggara Timur, **Yakines** berperan mendampingi kelompok perempuan di Manggarai Barat dalam praktik adaptasi perubahan iklim yang berbasis budaya dan pengetahuan lokal. Melalui konservasi mata air, penguatan pangan lokal, pengelolaan limbah, dan ekonomi kolektif, Yakines memperkuat kerja-kerja perempuan sebagai fondasi ketahanan komunitas dan keberlanjutan ekologi.

Sementara itu, dari Aceh, **Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala** berkontribusi melalui pengembangan baseline data responsif gender dan perubahan iklim. Pendekatan riset ACCI memperkaya pemahaman tentang kerentanan, kapasitas, dan pengalaman perempuan dalam menghadapi krisis iklim, sekaligus memperkuat dasar analitis bagi perumusan kebijakan dan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (MEL).

Melalui kerja konsorsium ini, Program EmPower II berupaya memastikan bahwa kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim tidak hanya

terdokumentasi sebagai praktik baik, tetapi juga diakui sebagai pengetahuan dan pijakan penting bagi perubahan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tentang EmPower II

EmPower II (EmPower: Women for Climate-Resilient Societies – Phase II) adalah program kemitraan UN Women dan UN Environment Programme (UNEP) untuk mempercepat aksi iklim yang responsif gender dan berbasis Hak Asasi Manusia di kawasan Asia-Pasifik. Program ini berangkat dari realitas bahwa dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan bencana tidak dirasakan secara setara, perempuan dan kelompok marjinal sering memiliki akses lebih rendah terhadap informasi, sumber daya, pembiayaan, dan teknologi, sehingga lebih sulit beradaptasi dan pulih paska krisis.

EmPower dimulai pada 2018 dan memasuki fase kedua pada 2023 dengan perluasan cakupan termasuk Indonesia dan Filipina, didukung oleh Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss.

Di Indonesia, EmPower II melakukan berbagai intervensi berdasarkan pada kerentanan iklim, misalnya Indonesia termasuk negara yang terdampak kejadian cuaca ekstrem, berisiko kenaikan suhu rata-rata tahunan hingga 0.8°C–1.4°C sekitar pada tahun 2050, rentan

terhadap kenaikan muka laut sebagai negara kepulauan, serta mengalami peningkatan jumlah kejadian bencana. Selain itu, perempuan berperan penting dalam rantai penggunaan energi sehari-hari namun masih kurang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di sektor energi dan sumber daya alam.

Secara strategi, EmPower II mendorong perubahan melalui tiga outcome berikut:

Outcome 1: Para pemangku kepentingan di kawasan Asia-Pasifik meningkatkan aksi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang responsif gender.

Outcome 2: Perempuan serta kelompok rentanmarjinal lainnya terwakili sebagai aktor lingkungan utama dalam pengambilan keputusan terkait iklim dan pengurangan risiko bencana (PRB).

Outcome 3: Perempuan dan kelompok rentanmarjinal lainnya di kawasan Asia-Pasifik terlibat dalam penghidupan yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Daftar Singkatan

BPS
Badan Pusat Statistik

CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

CSO
Civil Society Organization
(Organisasi Masyarakat Sipil)

EM4
Effective Microorganisms 4

ENDCs
Enhanced Nationally Determined Contributions

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

FGD
Focus Group Discussion
(Diskusi Kelompok Terarah)

KBG
Kekerasan Berbasis Gender

KEHATI
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

KHG

Kesatuan Hidrologis Gambut

KLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPPPA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LWPGs
Lima Work Programme on Gender (UNFCCC)

MEL
Monitoring, Evaluation, and Learning

MHA
Masyarakat Hukum Adat

Musrenbangdes
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NEK
Nilai Ekonomi Karbon

NPK
Nitrogen, Phosphorus, Potassium

NTB
Nusa Tenggara Barat

NTT
Nusa Tenggara Timur

PLTU
Pembangkit Listrik Tenaga Uap

POC
Pupuk Organik Cair

QuIP
Qualitative Impact Protocol

RAD-GPI
Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim

RAN-GPI
Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim

REDD+
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

SDGs
Sustainable Development Goals
(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

SKB
Surat Keputusan Bersama

TPA
Tempat Pembuangan Akhir

TPPO
Tindak Pidana Perdagangan Orang

UBSP
Usaha Bersama Simpan Pinjam

UNDP
United Nations Development Programme

UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFPA
United Nations Population Fund

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

WRI
Women Research Institute

Pendahuluan

Dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender. Perempuan, anak-anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan masyarakat miskin adalah kelompok yang paling rentan. UNDP (2010) mencatat bahwa perempuan dan anak-anak memiliki risiko kematian hingga 14 kali lipat lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam situasi bencana terkait iklim. Hal ini diperparah oleh struktur sosial yang patriarkal: akses perempuan terhadap tanah masih di bawah 20% meski mereka berkontribusi hampir 40% dalam sektor pertanian (FAO, 2021; KPPPA & KLHK, 2024).

Selain itu, dampak perubahan iklim berimplikasi pada meningkatnya kekerasan berbasis gender (KBG). Kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), UNFPA, dan UN Women (2023) menemukan bahwa 80% pengungsi akibat cuaca ekstrim dan perubahan iklim adalah perempuan, yang rentan menghadapi eksploitasi seksual dan perdagangan orang di lokasi pengungsian. Catatan Komnas Perempuan (2020–2024) mendokumentasikan 58 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela lingkungan di wilayah terdampak konflik agraria, pertambangan, dan pesisir (WRI & LBH APIK, 2025).

Untuk merespons kompleksitas ini, Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030 pada Maret 2024. RAN-GPI merupakan

tindak lanjut komitmen Indonesia terhadap *Lima Work Programme on Gender (LWPG) UNFCCC*, serta menempatkan gender sebagai isu strategis dalam kesehatan, pangan, air bersih, kebencanaan, dan transisi energi (KPPPA & KLHK, 2024). Namun, posisi hukum RAN-GPI saat ini hanya berupa dokumen kebijakan yang bersifat koordinatif. Ketidadaan regulasi mengikat menyebabkan pelaksanaannya belum konsisten antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Permasalahan Perempuan dalam Perubahan Iklim dan Kaitannya dengan Urgensi Implementasi RAN GPI

Di tingkat komunitas, perempuan menghadapi dampak yang berlapis akibat peran sosial, tanggung jawab domestik, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Dampak tersebut terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari perempuan, mulai dari rumah tangga hingga ruang publik.

Krisis air dan pangan akibat perubahan iklim meningkatkan beban kerja perempuan, karena merekalah yang ‘dianggap harus’ bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Perempuan harus bekerja lebih lama dan lebih berat untuk mendapatkan air bersih, pangan, dan menjaga kesehatan anggota keluarga. Pada saat yang sama, kerentanan ekonomi perempuan

meningkat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan skala kecil, dan usaha berbasis sumber daya alam yang sangat sensitif terhadap cuaca ekstrem dan gagal panen.

Perubahan iklim juga memperbesar risiko kesehatan, khususnya bagi perempuan, ibu hamil, dan anak-anak. Buruknya kualitas air, sanitasi, serta keterbatasan pangan bergizi meningkatkan risiko penyakit dan gizi buruk. Dalam situasi krisis dan bencana, perempuan menghadapi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, yang sering kali tidak terlihat dalam respons kebencanaan.

Meskipun menjadi kelompok yang terdampak paling besar, perempuan kerap mengalami keterbatasan akses dan suara dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim, energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Perspektif dan pengalaman perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai dasar perencanaan dan penganggaran iklim. Selain itu, perempuan, terutama yang berperan sebagai pembela lingkungan, juga menghadapi risiko intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan sosial ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Berangkat dari Pengalaman Lapangan: Perempuan, Alam, dan Jalan Perubahan

Perubahan iklim tidak hadir sebagai konsep abstrak bagi banyak Perempuan melainkan hadir dalam bentuk air yang semakin jauh untuk dijangkau, tanah yang kian sulit ditanami, musim

yang tak lagi bisa diprediksi, serta beban kerja perawatan yang semakin berat, sering kali tanpa pengakuan, tanpa perlindungan, dan tanpa ruang pengambilan keputusan. Di ruang-ruang domestik, di ladang, di pesisir, dan di hutan, perempuan kerap menjadi pihak pertama yang merasakan dampak krisis iklim, sekaligus yang paling lama beradaptasi dengannya.

Namun di balik kerentanan tersebut, terdapat kekuatan yang kerap luput dari sorotan: kepemimpinan perempuan yang tumbuh dari pengalaman hidup, pengetahuan lokal, dan kerja kolektif di tingkat komunitas. Buku Perempuan, Alam, dan Jalan Perubahan: Ketika Perempuan Memimpin di Tengah Krisis Iklim disusun untuk merekam, merayakan, dan sekaligus membuka ruang refleksi atas bagaimana kepemimpinan perempuan terbentuk dan berkembang dalam merespons krisis iklim. Buku ini merekam pengalaman lapangan Program EmPower II yang dilaksanakan oleh UN Women dan UNEP bekerja sama dengan Konsorsium Women Research Institute, bersama mitra-mitra lokal: Gema Alam di Nusa Tenggara Barat, Yakines di Nusa Tenggara Timur, serta Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala di Aceh, sepanjang tahun 2024–2026, yang didukung oleh Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss.

Kami tidak hanya menyajikan cerita, tetapi juga pengetahuan dan refleksi yang saling terhubung, mengajak pembaca menelusuri bagaimana pengalaman konkret di tingkat lokal berkelindan dengan kerangka kebijakan nasional. Bagaimana suara perempuan dapat, dan seharusnya, menjadi bagian penting dalam tata kelola perubahan iklim yang adil dan berkelanjutan.

Bagian Pengalaman Lapangan menghadirkan kisah-kisah nyata dari komunitas tempat Program EmPower II bekerja. Di sini, pembaca diajak melihat bagaimana perempuan menghadapi tekanan ekologis yang berlapis, sekaligus mengambil peran sebagai penggerak perubahan: mengelola sumber daya alam secara lebih lestari, membangun solidaritas komunitas, serta menegosiasikan ruang kepemimpinan di tengah norma sosial yang tidak selalu berpihak.

Untuk memberi konteks yang lebih luas, buku ini dilengkapi dengan Baseline Data Gender dan Perubahan Iklim. Bagian ini menyajikan gambaran awal mengenai kesenjangan gender, kerentanan, dan kapasitas perempuan dalam konteks krisis iklim, sebagai landasan analitis untuk memahami mengapa intervensi yang responsif gender bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Selanjutnya, buku ini merangkum Rangkaian Roundtable Discussion yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas Kerangka Regulasi Nasional Gender dan Perubahan Iklim. Diskusi-diskusi ini menjadi ruang penting untuk mempertautkan pengalaman lapangan dengan kebijakan, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta membuka dialog

lintas sektor tentang peran negara, masyarakat sipil, dan komunitas dalam mendorong agenda keadilan iklim yang inklusif.

Sebagai penutup sekaligus ajakan ke depan, buku ini menyajikan Usulan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi untuk implementasi regulasi nasional gender dan perubahan iklim. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa komitmen kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dipantau, diukur, dan dipertanggungjawabkan, dengan menempatkan perempuan dan kelompok rentan sebagai subjek utama perubahan.

Melalui rangkaian cerita, data, dialog kebijakan, dan tawaran kerangka kerja ini, buku ini berharap dapat menjadi ruang refleksi sekaligus inspirasi. Bahwa di tengah krisis iklim yang kian kompleks, jalan perubahan dapat—dan sedang—dibuka oleh perempuan. Dari tingkat komunitas hingga kebijakan nasional, dari pengalaman sehari-hari hingga agenda struktural, kepemimpinan perempuan bukan hanya mungkin, tetapi esensial bagi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kepemimpinan Perempuan dalam Keadilan Iklim

1. Aktor Garda Terdepan, Pengambilan Keputusan, dan Peluang

Menangani perubahan iklim adalah hal yang sangat kompleks. Ini merupakan masalah yang tidak berdampak sama bagi setiap kelompok. Perubahan iklim menyingkap dan memperburuk ketegangan serta tekanan sosial yang sudah ada sebelumnya, sehingga menyebabkan komunitas yang rentan menjadi semakin rentan. Inilah alasan mengapa menangani perubahan iklim memerlukan keputusan yang didorong oleh pengalaman mereka yang paling terdampak, yaitu: komunitas rentan dan aktor garda terdepan.

Namun, hal ini belum menjadi praktik yang umum. Keputusan sering kali diambil tanpa berkonsultasi dengan pihak yang paling terdampak, dan dalam beberapa kasus di mana kelompok rentan diundang untuk menyatakan pendapat atau berada di ruang pengambilan keputusan, kehadiran mereka sering kali hanya dianggap sebagai seremonial belaka. Kelompok rentan dan aktor garda terdepan seperti perempuan juga sering kali dicegah secara sistematis untuk bergabung dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pertemuan warga diadakan larut malam, waktu di mana bagi beberapa komunitas merupakan hal yang tabu bagi perempuan untuk keluar rumah. Mengadakan pertemuan warga larut malam

juga menambah beban bagi perempuan yang biasanya sudah harus bangun paling awal untuk tugas-tugas perawatan rumah tangga.

Perubahan iklim menyingkap tekanan sosial-ekonomi yang dibebankan kepada perempuan; kita tidak bisa lagi mengabaikannya. Keadilan iklim memerlukan pengambilan keputusan yang memusatkan pengalaman dan suara dari kelompok rentan serta aktor garda terdepan. Hal ini kini telah menjadi pengetahuan umum bagi mereka yang menangani perubahan iklim, dan di dalamnya terdapat peluang bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk mengambil peran dalam momen ini.

Posisi Unik Perempuan

Perempuan merepresentasikan baik aktor garda terdepan maupun kelompok rentan. Masyarakat Indonesia secara luas telah menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dan urusan domestik. Ini berarti perempuan bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan seluruh unit keluarga. Tugas untuk mengambil air, berbelanja kebutuhan pokok, dan merawat anggota keluarga yang membutuhkan perhatian membuat perempuan akan dan menjadi pihak pertama yang mengetahui kapan dampak negatif perubahan iklim melanda. Kenaikan harga pangan dan kebutuhan sehari-

hari, kenaikan harga serta kelangkaan gas LPG dan air bersih, hingga menurunnya kesehatan keluarga hanyalah beberapa contoh hal yang pertama kali disadari oleh perempuan.

Meskipun sebagian besar pekerjaan yang dilakukan perempuan untuk keluarga dan komunitas mereka tidak diperhatikan dan tidak dibayar, posisi yang dipegang perempuan menawarkan perspektif yang unik. Sebuah perspektif yang jika diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, maka tidak akan ada perubahan yang transformatif. Perempuan adalah kategori terluas ketika berbicara tentang interseksionalitas. Posisi perempuan adalah titik temu dari berbagai lini yang mencakup seluruh tekanan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dalam suatu komunitas.

Trickle-Up Disruption

Menangani perubahan iklim tanpa pertimbangan khusus mengenai keadilan tidak akan menghasilkan perubahan apa pun. Yang terjadi hanyalah degradasi perlahan, baik terhadap bumi yang kita tinggali maupun masyarakat yang kita bina. Pengalaman perempuan menawarkan semacam “tes lakmus” sosial-ekonomi bagi mereka yang bersedia mendengarkan. Bukannya Trickle-Down Economics (ekonomi tetesan ke bawah) ala Ronald Reagan, pengalaman perempuan justru menunjukkan fenomena Trickle-Up Disruption (gangguan rembesan ke atas) yang nyata.

Sebagai contoh, semakin banyak waktu dan energi yang harus dihabiskan perempuan di

pedesaan untuk merawat anggota keluarga yang sakit, mengambil air dari sumber yang jauh, serta mengkordinasikan upaya bantuan akibat dampak iklim hidrologis seperti banjir dan tanah longsor, maka semakin sedikit waktu yang ia miliki untuk berkontribusi pada kegiatan penghasil pendapatan, seperti membantu di pertanian keluarganya. Jika hal ini terus berlanjut, hasil panen akan memburuk dan menurun. Jika ini terjadi di wilayah yang cukup luas, para pembuat keputusan tingkat nasional di Jakarta akan mendapati bahwa harga bahan makanan di ibu kota akan melonjak naik.

Berinvestasi pada kapasitas, waktu, dan energi perempuan adalah pilar utama dalam mengejar stabilitas sosial-ekonomi di Indonesia. Bahkan ketika para pembuat keputusan tidak sepenuhnya mendukung dan melibatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam memerangi perubahan iklim, perempuan tetap menemukan cara-cara alternatif untuk memperjuangkan diri mereka sendiri dan komunitas mereka di tengah ketidakpastian.

Dilema

Beban yang diletakkan masyarakat pada pundak perempuan bukan sekadar bertambah (aditif), melainkan berlipat ganda (multiplikatif). Mereka adalah pengambil air, penyiap makanan, pekerja perawat, tenaga tani, perawat kesehatan, dan banyak lagi, bahkan sebelum sekarang diminta untuk menjadi pemimpin dan pembuat keputusan. Sekadar menyuruh perempuan untuk memimpin dan mengambil keputusan bukanlah bentuk dari keadilan. Agar perempuan dapat

menjadi pembuat keputusan yang efektif, mereka harus memiliki waktu, energi, dan kapasitas untuk melakukannya.

Jika ruang diciptakan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk berkontribusi. Kita sekarang mengadvokasi perempuan untuk memimpin perlawanan terhadap perubahan iklim; namun, perempuan sering kali terabaikan dan dikucilkan dari kesempatan pendidikan dan peningkatan kapasitas. Perempuan memiliki pengetahuan untuk melawan perubahan iklim berkat pengalaman hidup mereka; namun, mereka mungkin belum tahu cara menggunakan pengetahuan tersebut secara efektif dan mengubahnya menjadi tindakan nyata.

Inilah dilemanya. Kita menginginkan kepemimpinan perempuan karena keputusan seharusnya diambil dengan memusatkan pengalaman mereka yang paling terdampak; namun, kita juga harus memberikan ruang yang diperlukan bagi para perempuan ini untuk memimpin. Memberikan ruang tidak hanya berarti menyertakan perempuan dalam forum pengambilan keputusan, tetapi juga membekali mereka dengan alat-alat yang diperlukan untuk berkontribusi secara bermakna tanpa menambah beban lebih banyak dalam hidup mereka.

Berinvestasi pada Perempuan

Keadilan iklim tanpa kepemimpinan perempuan akan berakhir seperti rumah yang dibangun dengan fondasi yang lemah: runtuh. Perubahan

iklim telah berkembang hingga pada titik di mana masalah ini menuntut perubahan yang transformatif, bukan sekadar perbaikan ringan.

Perubahan transformatif dimulai dengan Kepemimpinan Perempuan. Perubahan pertama harus terjadi pada cara kita memandang perempuan dalam aksi iklim. Kita perlu berinvestasi pada perempuan agar mereka memiliki kapasitas, waktu, energi, dan ruang untuk berkontribusi secara bermakna.

Mengungkap Tabir Narasi Kepemimpinan Perempuan Mengatasi Krisis Iklim

Pada banyak daerah, perempuan adalah kelompok yang paling awal merasakan perubahan iklim, bukan karena mereka lebih rentan, tetapi karena merekalah yang paling dekat dengan sumber-sumber kehidupan.

Namun selama bertahun-tahun, pengalaman perempuan ini tidak diposisikan sebagai pengetahuan. Ia berhenti sebagai cerita personal, dianggap sebagai urusan domestik, dan jarang masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa. Padahal, pengalaman sehari-hari tersebut merekam secara konkret dampak perubahan iklim terhadap berkurangnya sumber daya dan menurunnya kualitas hidup. Kisah-kisah seperti air yang menimbulkan gatal di kulit, beban ember berat yang harus dijunjung setiap hari karena sumber mata air semakin jauh, kesulitan mendapatkan air bersih bagi konsumsi keluarga dan ternak, hingga nira aren yang semakin cepat menjadi asam, mencerminkan perubahan lingkungan yang nyata. Dampak ini tidak hanya memicu persoalan limbah dan penurunan

produksi pangan, tetapi juga berujung pada menurunnya, bahkan hilangnya, penghasilan keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berdampak pada kesehatan, khususnya bagi perempuan hamil dan anak-anak, mulai dari menurunnya kualitas kehamilan dan persalinan hingga meningkatnya risiko stunting. Meski demikian, pengalaman dan pengetahuan perempuan atas perubahan iklim beserta dampak berlapis yang menyertainya kerap diabaikan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Tulisan ini berangkat dari upaya untuk memperlihatkan bagaimana perempuan mengubah pengalaman hidup sehari-hari menjadi narasi pengetahuan perempuan dan dasar kepemimpinan mereka dalam adaptasi dan mitigasi dari dampak perubahan iklim yang mereka alami.

Inisiatif kelompok perempuan di Desa Pandan Indah, Lombok Tengah, dalam menghadirkan akses air bersih melalui solusi berbasis energi terbarukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. (Dok. Gema Alam)



Solusi pada Dampak Perubahan Iklim 1: Kelangkaan dan Menurunnya Kualitas Air

Air adalah sumber daya penting bagi kehidupan. Ia menentukan kesehatan keluarga, mengatur ritme kerja domestik, dan menopang penghidupan. Namun perubahan iklim, dikombinasikan dengan perubahan lanskap dan pembangunan berskala besar, dapat menggeser relasi masyarakat dengan air. Selain itu, perubahan iklim dapat membuat pola hujan tidak menentu dan mengakibatkan kelangkaan air pada musim kemarau berkepanjangan, karena debit mata air menurun, atau bahkan banjir bandang bila curah hujan yang sangat tinggi sehingga tidak bisa di kontrol penyaluran air yang berlebih tersebut.

Pada desa-desa dampingan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pada musim kemarau panjang air tidak sepenuhnya hilang, ia masih ada, tetapi kualitasnya menurun, ketersediaannya tidak menentu, atau sulit di akses oleh masyarakat. Situasi ini mendorong perempuan komunitas tidak hanya beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga secara perlahan membangun kesadaran dan kapasitas kolektif untuk merespons persoalan air sebagai isu bersama yang memerlukan solusi dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Mengadakan Air Melalui Sumur Bor dan Pompa Air Tenaga Surya

Di Desa Dasan Geria, Lombok Barat, air masih mengalir, tetapi berubah warna dan kualitas sejak aliran sungai dialihkan akibat pembangunan di

wilayah hulu. Air yang keruh tetap digunakan untuk mandi dan mencuci karena tidak ada pilihan lain. Perempuan di desa itu harus menyaring air berulang kali, membersihkan bak penampungan air lebih sering, dan memastikan kesehatan keluarga tetap terjaga. Selama bertahun-tahun, pengalaman ini tidak pernah dibicarakan dalam forum desa. Pengadaan air dipahami sebagai persoalan teknis, bukan persoalan mendasar bagi kehidupan.



Mama Regina bersiap menanam pohon konservasi mata air di Golo Lewé. Setiap tindakan kecil perempuan, dampak besar untuk lingkungan. (Dok. Yakines)

Dari Pengalaman Tubuh ke Kepemimpinan Tata Kelola Air Desa



Warih Astuti mengalami langsung dampak krisis air sehari-hari. Dari situ, lahir peran perempuan dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan air di komunitas. (Dok. Gema Alam)

Warih Astuti dengan sedih menyampaikan bahwa *‘kami tetap harus menggunakan air keruh untuk mandi, mencuci dan memasak di dapur. Kami tahu itu tidak bagus untuk kesehatan dan anak-anak kami juga terganggu tumbuh kembangnya.’*

Pembangunan Bendungan Meninting mengubah

aliran sungai di wilayah hulu, sehingga air bersih menjadi barang langka bagi warga Dusun Geria Utara, Nusa Tenggara Barat. Beban terberat ditanggung perempuan, termasuk Warih, yang harus menyaring air berulang kali dan mengatur ulang seluruh kehidupan domestik.

Pengalaman inilah yang mendorong Warih untuk terlibat aktif dalam kelompok perempuan dampingan Program EmPower. Melalui proses pendampingan, mulai dari pembentukan kelompok perempuan, ruang belajar bersama, hingga pemetaan partisipatif atas perubahan kualitas air, Warih dan perempuan lain memperoleh ruang aman untuk berbagi cerita, mengolah pengalaman sehari-hari sebagai pengetahuan, dan mengaitkannya dengan persoalan struktural pembangunan di tingkat desa. Dalam proses ini, air tidak lagi dibicarakan semata sebagai urusan teknis, melainkan sebagai persoalan martabat hidup yang menuntut keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan aksi iklim berbasis masyarakat.

Warih terlibat langsung dalam proses pemetaan

sumber air dan wilayah terdampak, diskusi dengan pemerintah desa, hingga advokasi di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Ia menjadi salah satu suara perempuan yang konsisten menyuarakan kebutuhan air bersih berbasis pengalaman nyata. Hasil dari proses panjang ini adalah pembangunan sumur bor komunal yang kini mengalirkan air bersih ke puluhan rumah di desanya.

Dari perempuan yang sebelumnya hanya “bertahan” menghadapi krisis air, Warih tumbuh menjadi figur yang memastikan perempuan hadir dalam tata kelola air desa. Ini membuktikan bahwa kepemimpinannya lahir bukan dari jabatan formal, melainkan dari keberanian mengubah pengalaman tubuh menjadi dasar pengambilan keputusan.



Kelompok perempuan mengadakan rapat untuk merumuskan pesan dan usulan yang akan dibawa ke Musrenbangdes, memastikan isu air, energi terbarukan, dan pangan keluarga menjadi prioritas dalam perencanaan desa. (dok. Gema Alam)

Perubahan terjadi ketika perempuan di Desa Dasan Geria mulai berbagi pengalaman dan memetakan perubahan yang mereka alami. Dari pertemuan informal di tingkat dusun, pengalaman perempuan perlahan diterjemahkan menjadi pengetahuan kolektif. Pemetaan sumber air dan wilayah terdampak membuka ruang baru bagi perempuan untuk bersuara dalam perencanaan desa, hingga akhirnya mendorong pembangunan sumur bor komunal yang dikelola bersama.

Desa Pandan Indah, Lombok Tengah, air menghilang hampir sepenuhnya saat kemarau panjang. Perempuan harus berjalan hampir satu

kilometer memanggul jeriken dan ember dari sungai kecil yang tersisa atau menanti bantuan air yang datang tidak menentu. Kekeringan tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga memiskinkan waktu perempuan. Waktu yang bisa digunakan untuk bekerja di kebun, merawat ternak, atau kegiatan produktif lainnya habis untuk mencari air.

Dalam situasi ini, perempuan Pandan Indah mulai membaca ulang lingkungan mereka melalui proses pendampingan Program EmPower. Matahari, yang selama ini identik dengan kemarau dan penderitaan, dipahami kembali sebagai potensi energi. Melalui pemetaan partisipatif dan diskusi bersama yang difasilitasi dalam kegiatan EmPower, perempuan terlibat langsung dalam perencanaan pompa air tenaga surya, mulai dari penentuan lokasi, pengelolaan, hingga mekanisme perawatan. Mereka tidak lagi sekadar menjadi pengguna air, tetapi berperan sebagai perencana, pengawas, dan penjaga keberlanjutan sistem air desa sebagai bagian dari aksi adaptasi iklim berbasis masyarakat.

Di Dasan Geria dan Pandan Indah, air menjadi pintu masuk kepemimpinan perempuan. Dari



Perempuan bersama komunitas mengambil peran dalam merawat mata air—membersihkan alang-alang agar sumber air tetap terjaga untuk kehidupan sehari-hari. (Dok. Yakines)

pengalaman yang sebelumnya terpinggirkan, perempuan membangun legitimasi untuk hadir, bersuara, dan memastikan bahwa akses air dipahami sebagai hak dasar, bukan sekadar layanan teknis.

Konservasi Mata Air

Bagi masyarakat Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mata air memiliki nilai spiritual yang mendalam dan dikenal melalui tradisi Luat Mata Wae, yaitu praktik menjaga mata air sebagai sumber kehidupan bersama. Merawat mata air dimaknai sebagai upaya kolektif yang mencakup perlindungan area resapan, penanaman vegetasi di sekitar sumber air, pembatasan aktivitas yang berpotensi mencemari atau merusak mata

air, serta pengelolaan pemanfaatan air secara adil dan berkelanjutan oleh komunitas. Tanpa konservasi aktifsemacam ini,berkurangnya curah hujan akibat perubahan iklim meningkatkan risiko kekeringan dan mengancam keberlanjutan sumber air yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat desa.

Para perempuan terampil dalam melakukan pengamatan berkala terhadap kondisi mata air dan pemeriksaan terhadap debit air. Mereka mencatat perbedaan intensitas aliran air dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Mereka juga mengidentifikasi perubahan warna air maupun indikasi adanya endapan yang mendangkalkan mata air. Aktivitas konservasi diawali dengan proses pembersihan menyeluruh pada area sekitar mata air. Vegetasi liar berupa semak, gulma, serta akumulasi

sampah dibersihkan. Keberadaan vegetasi liar yang tidak terkendali berpotensi menghambat aliran air sekaligus mempercepat proses erosi. Pengalaman lokal sangat penting bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam melalui penanaman dan pemeliharaan pohon. Pohon-pohon pengikat dan penyaring air seperti ara, bancang, munting, dan pinang ditanam di area tangkapan air. Setiap bulan, anggota kelompok melakukan “pengokeran” yaitu istilah Manggarai untuk perawatan berupa menyiram, membersihkan gulma di sekitar akar serta mengganti pohon yang mati. Selain juga memastikan tidak ada hewan yang merusak.

Melalui pendampingan Program EmPower, kegiatan konservasi mata air yang dijalankan oleh kelompok perempuan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam tata kelola sumber daya alam. Proses pembentukan kelompok, diskusi rutin, dan pendampingan aksi konservasi, seperti perlindungan area mata air, penanaman vegetasi, serta pengaturan pemanfaatan air, mendorong terjadinya perubahan di tingkat individu dan

komunitas. Perempuan yang sebelumnya tidak percaya diri untuk berbicara di forum publik kini berani menyuarakan pandangan mereka dalam pertemuan desa dan memimpin aksi pengelolaan sumber mata air. Seiring dengan itu, kepala desa dan perangkat desa mulai melibatkan kelompok perempuan sebagai mitra konsultasi sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan air dan lingkungan.

Perubahan ini juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Konservasi mata air dan perbaikan sistem pengelolaan air membuat akses air bersih menjadi lebih dekat dan terjaga, sehingga beberapa perempuan melaporkan penghematan waktu hingga satu hingga dua jam per hari yang sebelumnya dihabiskan untuk mengambil air. Waktu yang tersedia kemudian dapat dialihkan untuk kegiatan produktif, perawatan keluarga, maupun partisipasi dalam kegiatan komunitas. Melihat manfaat nyata tersebut, sejumlah laki-laki di desa mulai terlibat dalam kegiatan konservasi mata air, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim dapat mendorong praktik yang lebih inklusif dan adil gender di tingkat komunitas.

Harapan yang Menumbuhkan Aksi

Ibu Matildis Samut, memimpin kelompok perempuan Tegi Momang bangkit sebagai pelopor konservasi di desa Lalong, kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

“Kami perempuan menanam pohon ara, beringin, bancang, dan munting untuk pengikat air mama’

Kami juga menanam pohon penyaring air seperti pinang, pandan duri, serta keladi air di sekitar mata air dan daerah aliran sungai. Setiap tiga bulan kami melakukan La’at mata wae, tradisi kunjungan ke mata air untuk melihat aliran air masih bagus. Kami perempuan di sini juga bisa bersama-sama menjaga mata air kami.”

Meski musim kemarau panjang sering mematikan



Di tengah tantangan perubahan iklim, warga bersatu menjaga mata air—membangun harapan akan keberlanjutan sumber air bagi generasi berikutnya. (Dok. WRI)

anakan pohon dan menurunkan debit air, semangat kelompok tidak surut. Ibu Matildis terus mengingatkan, *“Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tetapi upaya ini adalah jaminan air bersih bagi anak cucu kita kelak.”*

Secara konsisten, ia menghidupkan semangat kolektif, dan menjadikan konservasi mata air sebagai gerakan perempuan desa. Kini, suara perempuan bukan hanya terdengar di dapur atau ladang, tetapi juga di hutan dan sungai sebagai penjaga kehidupan generasi mendatang.

Perempuan mampu memimpin dalam menghadapi krisis iklim yang terlihat dari upaya mereka dalam mengadakan ketersediaan air bersih di komunitas. Hal ini tumbuh dari pengalaman hidup sehari-hari, dari keberanian untuk membaca perubahan, berbagi pengetahuan, dan mengorganisir tindakan kolektif.

Partisipasi perempuan dalam melakukan konservasi mata air tidak hanya memperkuat dimensi ekologis tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang lebih adil bagi masyarakat di tingkat komunitas. Perempuan dapat membangun tata kelola air yang berkelanjutan karena mereka yang paling terdampak dari masalah ketersediaan air untuk kehidupan sehari-hari.



Perempuan Rarang mengolah sampah organik dan bioslurry menjadi pupuk cair dan padat, yang kemudian digunakan untuk kebun pangan keluarga. (Dok. Gema Alam)

Solusi pada Dampak Perubahan Iklim 2: Persoalan Limbah dan Menurunnya Produksi Bahan Pangan

Limbah dan sampah sering dianggap sebagai persoalan kecil dan merupakan urusan domestik. Padahal limbah berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan, emisi, dan ketahanan pangan.



Sesi pemetaan masalah bersama EmPower: perempuan dari 11 dusun menyampaikan persoalan sampah dan merumuskan solusi berbasis dusun. (dok. Gema Alam)

Mengelola sampah dan limbah menjadi pupuk organik

Di **Desa Lantan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat**, persoalan sampah paling terasa di dusun-dusun yang tidak terjangkau layanan pengangkutan. Sampah rumah tangga menumpuk, dibakar, atau dibuang ke sungai. Perempuan harus menghadapi bau, lalat, dan risiko kesehatan setiap hari.

Ketika perempuan di Desa Lantan mulai terlibat dalam pemetaan jalur pengangkutan dan titik penampungan sampah berbasis dusun, cara desa memahami sampah pun berubah. Sampah tidak lagi dianggap urusan rumah tangga, tetapi persoalan kolektif yang membutuhkan sistem bersama.

Di **Desa Rarang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat**, limbah rumah tangga yang bercampur dengan limbah ternak menimbulkan persoalan sanitasi yang berdampak langsung pada kehidupan perempuan. Melalui proses belajar dan pengorganisasian, perempuan

Rarang mengolah limbah ternak menjadi biogas sebagai sumber energi bersih untuk memasak. Energi ini mendukung pengolahan pangan rumah tangga yang lebih aman dan efisien, sekaligus memanfaatkan residu biogas sebagai pupuk organik bagi kebun pangan keluarga. Praktik ini mengurangi beban kerja dan biaya energi rumah tangga, menekan emisi, serta memperbaiki kesehatan lingkungan desa.

Di Desa Taman Ayu, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, masyarakat berada di tengah



Kebun Kesetaraan di Desa Taman Ayu dikelola secara kolektif oleh perempuan dan komunitas, menjadi ruang perempuan merawat tanaman, berbagi pengetahuan, dan memenuhi kebutuhan bersama. (dok. Gema Alam)

tekanan ekologis berlapis, kombinasi limbah ternak yang menumpuk di desa, tekanan lingkungan dari infrastruktur besar di sekitarnya seperti PLTU dan TPA regional, kenaikan biaya energi rumah tangga, serta kondisi pesisir yang rawan banjir dan abrasi. Limbah ternak yang sebelumnya menjadi sumber masalah diolah secara kolektif menjadi biogas, sementara bioslurry (residu padat dan cair hasil pengolahan biogas yang kaya unsur hara) dimanfaatkan sebagai pupuk untuk kebun pangan bersama.



Fasilitas biogas komunal di Desa Taman Ayu yang mengolah limbah ternak menjadi energi bersih untuk kebutuhan bersama. (Dok. WRI)

Di Desa Lalong dan Golo Lewe, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, persoalan limbah telah berhasil mereka atasi dengan mengolahnya untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Para perempuan berhasil mengolahnya menjadi enam jenis pupuk

dan pestisida organik melalui pendampingan intensif. Mereka kini mampu memproduksi Pupuk Bokashi, EM4, Pupuk Organik Cair (POC), KCI Organik, Fungisida Organik, dan Pestisida Nabati dengan bahan-bahan lokal seperti jerami, kotoran ternak, abu kayu, dan tanaman obat. Proses produksi dilakukan secara gotong royong, menghasilkan produk berkualitas yang setara bahkan lebih baik dari komersial.

Perempuan memiliki pengetahuan lokal untuk memanfaatkan dedak, kotoran ternak, sisa tanaman, abu kayu, dan bahan organik lain yang selama ini dianggap sebagai limbah. Pemilahan sampah dari rumah, pengolahan sampah atau limbah organik menjadi pupuk, dan pemanfaatannya untuk kebun pekarangan menghubungkan isu lingkungan dengan ketahanan pangan keluarga. Para perempuan mampu mengolah limbah dan bahan-bahan lokal menjadi pupuk organik yang berkualitas.

Belajar dan bertransformasi bersama kelompok Momang Koe

Ibu Monika Lujum, ketua kelompok Momang Koe, Desa Lalong, Nusa Tenggara Timur, menyatakan bahwa *“selama ini kami hanya mengandalkan pupuk kimia seperti Urea dan NPK yang sulit didapat dan mahal”*. *“Namun keterbatasan air dan meningkatnya resistensi hama menjadi hambatan utama dalam budidaya padi dan sayuran”, produksi pun menurun drastis akibat perubahan iklim”*

Tanpa putus asa, Ibu Monika mengajak ibu-ibu dari rumah ke rumah untuk ikut sosialisasi. Kini, kelompoknya beranggotakan 24 perempuan aktif yang terus mengembangkan pertanian organik. Ia memimpin dengan teladan nyata mengaplikasikan

pupuk dan pestisida organik di lahannya sendiri dan membuktikan dampaknya secara langsung.

Setelah pendampingan, ia mampu memproduksi pupuk organik secara mandiri—hingga 200 liter pupuk cair dan pestisida serta 500 kg bokashi per produksi. Biaya pertanian pun turun drastis dari Rp2.775.000 menjadi Rp600.000 per musim tanam, menghemat hingga 78%.

“Kini saya tidak lagi khawatir soal pupuk kimia. Dengan memproduksi pupuk organik sendiri, biaya pertanian berkurang hingga 78% dan hasilnya lebih sehat bagi keluarga serta lingkungan. EmPower membuat kami perempuan berani terlibat dalam aksi iklim di desa.” kata Ibu Monika Lujum.



Kelompok Tani Mandiri membuat pupuk organik dari tanaman sekitar dan kotoran ternak. Kemandirian input pertanian dimulai dari memanfaatkan sumber daya lokal - tidak lagi bergantung pada pupuk kimia mahal. (Dok. Yakines)

Penggunaan pupuk organik yang diproduksi oleh kelompok perempuan, selain meningkatkan kesuburan tanah dan ketahanan tanaman terhadap hama, juga dapat menghemat biaya pertanian hingga 60%, ramah lingkungan, serta memperkuat sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan sebagai bagian dari aksi iklim berbasis komunitas yang dipimpin perempuan.

Praktik pembuatan pupuk organik juga membangun resiliensi jangka panjang sistem pertanian terhadap perubahan iklim lewat perbaikan tanah, pengurangan risiko, dan kemampuan petani untuk memproduksi sendiri bahan-bahan pertanian yang mereka butuhkan. Pendekatan ini menegaskan kepemimpinan perempuan sebagai strategi efektif untuk ketahanan pangan sekaligus adaptasi iklim.

Pendampingan pembuatan pupuk dan pestisida organik membuktikan perempuan dapat menjadi penggerak utama aksi iklim. Dengan dukungan tepat, mereka tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga membangun jaringan, memengaruhi kebijakan, dan menghasilkan dampak berlapis.

Para perempuan desa membangun kepercayaan diri untuk membawa isu pengelolaan sampah dan limbah ke forum desa dan memengaruhi arah perencanaan. Melalui pengelolaan sampah dan limbah para perempuan dapat mengurangi biaya pengelolaan pertanian dan meningkatkan produksi pertaniannya. Sampah dan limbah tidak lagi menjadi persoalan, tetapi sebagai infrastruktur peningkatan pertanian dan kehidupan yang menopang energi, pangan, dan kesehatan desa.



Menanam sorgum di Dea Lalong - diversifikasi pangan untuk ketahanan. Perempuan memimpin transformasi dari ketergantungan beras menuju keragaman pangan lokal yang berkelanjutan. (Dok. Yakines)

Dari Ketergantungan Beras ke Keragaman Pangan

Di tengah ancaman kekeringan yang semakin parah, Ibu Imakulata Jedia, Sekretaris Kelompok Tani Mandiri di Desa Golo Lewe, Nusa Tenggara Timur, mulai kembali pada pangan lokal yang hampir terlupakan. Melalui pendampingan Program EmPower II, perempuan di desa ini membangun pemahaman tentang risiko ketergantungan pada satu komoditas pangan dan pentingnya ketahanan pangan berbasis lokal di tengah perubahan iklim. *“Sebelumnya keluarga saya sangat tergantung pada berat”,* tuturnya.

Melalui proses belajar bersama dan pengelolaan kebun pekarangan, Ibu Imakulata mengembangkan beragam pangan lokal, seperti umbi-umbian, biji-bijian, dan kacang-kacangan, sehingga pola konsumsi keluarga menjadi lebih beragam dan adaptif. Ketika padi gagal panen akibat kekeringan atau banjir, keluarga tetap memiliki pilihan pangan. Perubahan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga mendorong perempuan di desa untuk kembali memimpin praktik pangan lokal sebagai bagian dari adaptasi iklim berbasis komunitas.



Perempuan di Desa Golo Lewe mengelola bank benih lokal sebagai upaya menjaga keberagaman pangan dan ketahanan komunitas di tengah perubahan iklim. (Dok. WRI)

Bank Benih Lokal Komunitas Desa Lalong dan Desa Golo Lewe

Menghadapi ancaman kehilangan varietas lokal dan meningkatnya ketergantungan pada benih komersial, kelompok perempuan di beberapa desa mengorganisir penyimpanan benih komunitas. Sistem ini beroperasi dengan prinsip sederhana: anggota menyimpan sebagian benih panen terbaik mereka secara tradisional, dan benih tersebut tersedia untuk dipinjam oleh anggota yang kekurangan dengan kewajiban

mengembalikan lebih banyak setelah panen. Penyimpanan benih menjadi lebih dari sekadar gudang penyimpanan karena berfungsi sebagai arena belajar informal untuk menguji adaptasi varietas terhadap perubahan iklim. Setiap musim tanam, para anggota mencatat performa varietas yang mereka tanam: berapa lama tahan kekeringan, seberapa baik hasilnya saat curah hujan di bawah normal, apakah rentan terhadap hama tertentu yang populasinya meningkat. Informasi ini dikumpulkan dan didiskusikan dalam pertemuan rutin, membangun himpunan

pengetahuan kolektif tentang karakteristik adaptif setiap varietas dalam kondisi iklim yang berubah.

Pembentukan lumbung benih individu untuk 10 varietas pangan lokal (jumbang, leba, celok, wue, lusa, sela/jali-jali, mesak/sorgum, dewas, longa/wijen, kundung) menggunakan wadah tradisional (teru, tatap, pengek, roto) menunjukkan pemahaman tentang pentingnya keberagaman hayati dan kedaulatan pangan.

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme konservasi tetapi juga sebagai penyangga ekonomi dan pelestarian budaya. Perempuan yang mengelola lumbung benih ini menjadi penjaga sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang penting untuk adaptasi iklim. Ketika kekeringan ekstrem melanda pada tahun tertentu dan banyak petani kehilangan seluruh benih mereka, penyimpanan benih menjadi jaring

pengaman yang mencegah ketergantungan total pada pasar benih eksternal. Distribusi benih darurat memungkinkan petani tetap menanam di musim berikutnya tanpa harus membeli benih komersial yang mahal. Sistem pengembalian yang fleksibel, disesuaikan dengan hasil panen aktual, memastikan keberlanjutan penyimpanan benih tanpa membebani anggota yang mengalami gagal panen.

Tantangan yang masih dihadapi bank benih ini adalah keterbatasan infrastruktur. Penyimpanan masih menggunakan lumbung tradisional yang rentan terhadap kondisi kelembaban dan serangan hama. Dokumentasi pada varietas benih belum tersistem dengan baik, masih mengandalkan memori kolektif yang bisa hilang jika tidak tercatat. Akses geografis juga menjadi kendala bagi desa yang jauh, membatasi skala dampak yang bisa dicapai.

Forum Pangan Perempuan: Platform Belajar Bersama

Kelompok perempuan di wilayah dampingan membentuk forum dan praktik belajar yang salah satunya membahas ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Ini menjadi ruang vital untuk berbagi strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Di forum ini, perempuan tidak hanya mendiskusikan praktik pengelolaan lahan dan sumber daya, tetapi juga mengembangkan strategi kolektif. Pertukaran pengetahuan dalam forum berubah dari sekadar berbagi pengalaman menjadi inovasi kolektif. Perempuan mulai melakukan praktik dengan waktu tanam yang lebih fleksibel, tidak lagi mengikuti pola tradisional yang kaku. Beberapa

Solusi pada Dampak Perubahan Iklim 3: Menurunnya Sumber Ekonomi

Perempuan menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat. Perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan berkepanjangan, curah hujan yang tidak dapat diprediksi, gagal panen yang semakin sering, memperburuk kerawanan pangan dan tekanan ekonomi rumah tangga. Di tengah kondisi ini, rangkaian acara adat yang berlangsung sepanjang tahun pada desa-desa dampingan, seperti upacara pernikahan, kematian, ritual panen turut menambah beban finansial yang tidak dapat dielakkan.

Dalam konteks ini, perempuan yang

mencoba menanam lebih awal untuk menghindari kekeringan di akhir musim, yang lain menanam lebih lambat untuk memanfaatkan hujan residual. Hasil kerja praktik kemudian didiskusikan, dan strategi yang berhasil diadopsi lebih luas. Semangat “belajar bersama-maju bersama” menjadi napas utama mereka.

Dalam proses ini, perempuan menemukan ruang kepemimpinan baru. Mereka tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga menjadi produsen pupuk organik, inovator pertanian, melestarikan tanaman dan benih lokal dan pengambil keputusan di kelompok tani. Forum ini juga membahas produktifitas pertanian, seperti perluasan usaha sayuran masing-masing anggota guna memenuhi permintaan pasar.

bertanggung jawab atas penyediaan pangan dan kesejahteraan keluarga berada pada situasi krisis. Krisis iklim memunculkan krisis lain, yaitu menurunnya sumber penghasilan karena berkurangnya sumber daya seperti akibat kekeringan, banjir dan gagal panen.

Perempuan membutuhkan akses ke modal yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga tidak menambah kerentanan ekonomi mereka. Seringkali, para perempuan dalam rangka mencari modal mereka terpaksa mengambil pinjaman dengan sistem rentenir berbunga tinggi. Hal ini semakin memperparah kemiskinan dan ketergantungan ekonomi para perempuan. Untuk itu, perlu diperkuat kemampuan ekonominya baik ditunjukkan usaha yang menghasilkan atau membangun kekuatan ekonomi kolektif.

Memperkuat kapasitas ekonomi melalui produksi gula aren

Di Desa Tete Batu Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, perempuan telah lama menggantungkan hidup pada pohon aren. Perubahan cuaca membuat nira lebih cepat asam dan produksi menurun, memaksa banyak perempuan menjual nira mentah dengan nilai lebih rendah.

Melalui refleksi dan pemetaan bersama, perempuan desa Tete Batu Selatan mulai membaca kembali aren sebagai lebih dari sekadar komoditas ekonomi. Aren dipahami

sebagai pohon konservasi yang menjaga air dan tanah, sekaligus sebagai identitas pangan dan budaya desa. Pohon aren menjadi proses penting untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang hubungan antara perempuan, pangan, dan lingkungan.

Dari dapur rumah tangga, gagasan ini bergerak ke ruang publik desa. Perempuan mulai menyuarakan pentingnya pelestarian aren dan pangan lokal dalam forum perencanaan. Pengalaman mengolah nira berubah menjadi argumen konservasi, dan ekonomi perempuan dirajut sebagai bagian dari strategi adaptasi iklim berbasis budaya.

Merawat Aren, Merawat Masa Depan Desa



Perempuan Tete Batu Selatan mengolah nira aren secara turun-temurun sebagai sumber penghidupan dan identitas pangan lokal desa. (Dok. Gema Alam)

Huriati mengatakan, “Pohon aren adalah bagian dari hidup kami. Sejak lama kami di sini mengolah nira menjadi gula tradisional untuk menopang ekonomi keluarga. Namun perubahan iklim perlahan menggerus penghidupan kami di sini. Nira menjadi lebih cepat asam, produksinya menurun, dan banyak perempuan di desa kami terpaksa menjual nira mentah dengan nilai lebih rendah.”

Huriati bersama perempuan lain di Tete Batu Selatan, Nusa Tenggara Barat. membuat kelompok perempuan dampingan di dusun Keselet Aren, mereka tidak hanya mendata jumlah pohon aren, tetapi juga membuka diskusi tentang kerentanan iklim, praktik pengelolaan berkelanjutan, dan masa depan desa. Dari dapur rumah tangga, gagasan ini bergerak ke ruang publik. Pengalaman mengolah nira berubah menjadi argumen konservasi dan advokasi pangan lokal.

Kini, Huriati dan perempuan lain berani menyuarakan pentingnya pelestarian aren dan pangan lokal dalam forum desa. Aren menjadi identitas desa wisata, penguat ekonomi perempuan, sekaligus strategi adaptasi iklim berbasis budaya. Para perempuan menguat perekonomiannya melalui pemasukan dari usaha pembuatan gula aren. Kepemimpinannya tumbuh dari praktik sehari-hari, merawat pangan, menjaga pengetahuan, dan memastikan keberlanjutan hidup desa.

Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP): Penguatan ekonomi kolektif



Kelompok Tani Mandiri menggelar pertemuan UBSP, membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan dimulai dari kolektivitas dan saling mendukung. (Dok. Yakines)

Kelompok perempuan dampingan di Desa Lalong dan Desa Golo Lewe, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mengembangkan upaya penguatan ekonomi secara kolektif melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP). Inisiatif ini menjadi ruang bagi perempuan untuk saling mendukung secara finansial, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan posisi tawar mereka dalam kehidupan komunitas serta pengambilan keputusan. UBSP tidak hanya menjawab kebutuhan akses modal yang selama ini terbatas, tetapi juga memperkuat solidaritas dan ketahanan ekonomi perempuan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan dampak perubahan iklim.

UBSP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perempuan untuk mengelola modal bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan permodalan kepada kelompok yang membutuhkan pendanaan untuk

pengembangan kewirausahaan hijau masing-masing anggota kelompok.

Dalam model UBSP yang dilakukan oleh perempuan di desa dampingan ini, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela merupakan simpanan yang disetorkan anggota untuk dijadikan modal bersama yang akan digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota lain:

▪ **Simpanan Pokok:** Simpanan yang dibayarkan sekali saat menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali selama masih menjadi anggota.

▪ **Simpanan Wajib:** Simpanan yang dibayarkan secara rutin, biasanya setiap bulan. Besaran simpanan wajib tergantung kebijakan masing-masing kelompok. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota.

▪ **Simpanan Sukarela:** Simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan (bebas). Saat uang ini dipinjamkan ke anggota, wajib menyetor bunga pinjaman.

UBSP menghasilkan transformasi yang melampaui akses modal. Dalam perkembangannya, pertemuan-pertemuan UBSP menghasilkan beberapa dinamika positif yang memperkuat kelompok.

Pertama, keaktifan anggota di dalam kelompok terus meningkat, pertemuan rutin tidak lagi sekadar kewajiban administratif tetapi menjadi ruang partisipasi aktif di mana setiap anggota

merasa memiliki peran dan suara.

Kedua, suasana kekeluargaan antar anggota semakin kuat, menciptakan ikatan sosial yang melampaui transaksi finansial. Solidaritas ini menjadi jaring pengaman sosial ketika anggota menghadapi kesulitan.

Ketiga, UBSP terbukti sangat membantu perempuan dalam membangun usaha dan mendukung pendidikan anak, meskipun

modal yang tersedia masih relatif kecil.

Keempat, kelompok-kelompok ini telah berkembang menjadi wadah untuk bertukar ilmu, pengalaman, dan informasi yang memperkaya pengetahuan kolektif anggota tentang praktik pertanian, pengolahan pangan, manajemen keuangan, hingga strategi pemasaran.

Membangun Ketahanan Ekonomi Menghadapi Ketidakpastian

Ibu Fransiska L. Bombong, Bendahara Kelompok Tani Mandiri, Desa Golo Lewe, Nusa Tenggara Timur, menghadapi tantangan bagaimana membangun sistem keuangan yang tangguh di tengah ketidakpastian iklim. “Kelompok Tani Mandiri sempat membangun Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP), namun sering kali terjadi keterlambatan/tunggakan pinjaman ditambah sistem pembukuan yang kurang jelas,” kenangnya tentang masa-masa sulit. “Hal ini menyebabkan kepercayaan anggota menurun dan modal usaha kelompok sulit berkembang.”

Di tengah perubahan iklim yang membuat produksi pertanian tidak menentu, petani membutuhkan akses finansial yang fleksibel dan cepat. Ketika gagal panen, mereka butuh modal untuk musim tanam berikutnya. Ketika ada kebutuhan mendesak, mereka tidak bisa menunggu proses pinjaman yang berbelit-belit. Inilah mengapa UBSP berbasis komunitas menjadi sangat penting.

“Kami membuat peraturan dan kesepakatan yang jelas bahwa setiap anggota yang terlambat mengembalikan pinjaman akan dikenakan sanksi/denda. Modal

terus berkembang meskipun masih terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan anggota. Namun kami terus berkomitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan UBSP ini ke depannya,” jelasnya.

“Cita-cita kelompok di kemudian hari adalah pinjaman ke koperasi luar berkurang bahkan tidak ada lagi. Sejauh ini UBSP sangat membantu dalam pengembangan usaha pertanian, kebutuhan mendadak biaya sekolah anak, dan acara sosial,” tambah Ibu Fransiska.

UBSP ini menjadi penyangga ekonomi ketika ketidakpastian iklim membuat pendapatan pertanian naik-turun. Ketika gagal panen karena kekeringan atau serangan hama, anggota kelompok masih punya akses ke modal untuk bangkit kembali. Inilah esensi ketahanan ekonomi berbasis komunitas.

Transparansi bukan hanya soal mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan benar, tetapi juga soal membangun kepercayaan di antara anggota kelompok. Dalam konteks masyarakat desa di mana hubungan sosial sangat penting, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga.

REFLEKSI: Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim

Kisah para perempuan ini bukanlah cerita romantis tentang ini tidak berhenti pada narasi kepahlawanan individual. Ini adalah cerita tentang kepemimpinan yang tumbuh secara kolektif, tentang bagaimana perempuan, yang secara tradisional dianggap hanya sebagai pelaksana, sangat dapat perlahan mengambil peran sebagai perumus dalam merumuskan solusi, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan pengadvokasi bahkan memengaruhi arah kebijakan.

Pengalaman mereka mengajarkan bahwa menunjukkan bagaimana solidaritas adalah menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kelangkaan sumber daya akibat kekeringan. Para mama dan inaq ini membuktikan bahwa perempuan bisa masuk ke ruang kebijakan desa dan mengadvokasi kebutuhan mereka sendiri. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan yang hadir melalui teladan lebih efektif daripada kerap menjadi lebih bermakna dibandingkan sekedar instruksi. Mama Imakulata berbagi tentang aksinya melestarikan keragaman pangan lokal sebagai strategi ketahanan.

Di berbagai wilayah, termasuk Baik di NTB maupun dan NTT, para perempuan ini menghadapi isu tantangan iklim yang sama serupa, yaitu kekeringan mulai dari, kelangkaan air, cuaca ekstrem, hingga ketidakpastian musim yang memengaruhi produksi dan penghidupan.

Mereka merespons dengan kunci: tidak menunggu solusi dari luar, tetapi membangun solusi dari dalam komunitas mereka sendiri.

Pengalaman ini juga memperlihatkan Yang paling penting, mereka membuktikan bahwa aksi iklim tidak harus dimulai dengan selalu berangkat dari teknologi canggih atau investasi besar. Aksi iklim seringkali bermula dari ruang-ruang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebun, pekarangan, mata air, hingga praktik sederhana seperti mengolah kotoran limbah ternah untuk menjadi biogas sumber energi dan serta pupuk dan system keuangan berbasis komunitas. Aksi iklim dimulai dengan membangun solidaritas, kepercayaan, dan kepemimpinan kolektif.

Seperti yang disampaikan Mama Getrudis: “Kami tidak menyangka bisa hadir dan menyampaikan hal apa yang kami alami di desa kami. Terima kasih karena telah mendukung dan memberi kepercayaan bagi kami perempuan desa untuk menjadi pemimpin dan melakukan advokasi di desa sehingga kami bisa mandiri, mengambil keputusan baik di ranah keluarga, pemerintahan desa, ataupun di kabupaten tentang masalah lingkungan.”

Nada serupa juga disampaikan oleh Inaq Baiq Anom: “Kami bangkit, kalau kami tidak bicara siapa lagi, karena kami yang sangat tahu lelahnya bekerja untuk semua dan untuk

di rumah.” Ungkapan yang disampaikan oleh Mama Getrudis dan inaq Baiq Anom adalah gambaran yang dialami dan dilakukan oleh para perempuan di wilayah dampingan di NTB dan NTT merefleksikan pengalaman yang lebih luas, tentang proses yang dijalani perempuan dalam menghadapi dan merespon krisis di komunitas mereka. Inilah awal dari transformasi yang lebih besar. Ketika perempuan terlibat dalam kepe memimpin aksi iklim, dampaknya tidak hanya

terasa pada penyelesaian persoalan di tingkat mereka tidak hanya menyelamatkan desa, tetapi juga membuka ruang perubahan yang lebih luas, termasuk mereka dari krisis, justru mereka mengubah struktur kekuasaan dan membuka jalan bagi generasi perempuan berikutnya. Krisis iklim adalah nyata. Tapi respons para perempuan terhadap krisis itu juga nyata dan sangat efektif.



Pemandangan Asap pembakaran terlihat di dekat Mushola dalam Komplek Waduk Keureto, Desa Blang Pante, Kec Paya Bakong, Aceh Utara. (Dok. ACCI USK)

Membaca Dampak Perubahan Iklim melalui Baseline Data Responsif Gender: Pembelajaran dari Pengalaman Aceh

Mengapa Baseline Data Responsif Gender Menjadi Penting

Dalam banyak pencatatan dampak perubahan iklim dan bencana, angka sering kali hadir tanpa cerita. Data korban, pengungsi, atau kerusakan lingkungan disajikan tanpa pemisahan berdasarkan gender, usia, atau kondisi kerentanan. Akibatnya, pengalaman perempuan dan kelompok rentan hampir selalu tidak muncul, meskipun merekalah yang sering kali menanggung dampak paling berat dan paling lama.

Banjir di Sumatra pada tahun 2025 telah mengakibatkan jutaan orang terdampak dan ratusan ribu mengungsi. Ketersediaan data pilah menjadi penting untuk memastikan respons

kebijakan dan bantuan telah dipertimbangkan perbedaan risiko kebutuhan, beban kerja, serta risiko spesifik yang dihadapi perempuan, anak, lansia, dan orang dengan disabilitas. Data yang tidak responsif gender akan berpotensi memperdalam ketimpangan yang telah ada.

Di sinilah baseline data responsif gender menjadi krusial. Baseline bukan sekedar potret awal, melainkan menjadi fondasi untuk memahami siapa yang terdampak, pengalaman yang dihadapi dan mengapa memiliki dampak berbeda. Bagi pemerintah daerah, baseline data yang dikelola dengan perspektif gender memungkinkan perumusan kebijakan iklim dan energi yang lebih tepat sasaran, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa Baseline Data Responsif Gender Penting?

Karena krisis iklim tidak dialami secara seragam. Tanpa data pilah gender dan kerentanan, kebijakan hanya membaca angka, bukan pengalaman.

Baseline data responsif gender membantu memastikan bahwa respons iklim tidak memperdalam ketimpangan, tetapi justru mengurangnya.



Ibu-ibu desa bergotong royong memasak untuk acara pernikahan salah satu warga di Desa Bantayan, Kec Seunuddon, Aceh Utara. (Dok. ACCI USK)

Apa yang Ditunjukkan oleh Temuan Baseline Data

Baseline data responsif gender yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Utara memotret situasi perempuan dan rumah tangga secara lebih utuh. Selain menggunakan 14 indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), baseline ini menelaah akses terhadap layanan dasar, pengalaman kebencanaan, ketahanan pangan, kondisi ekosistem, praktik pertanian, serta akses dan penggunaan energi, termasuk energi terbarukan. Baseline data ini tidak hanya menyajikan angka, tetapi membuka lapisan-lapisan pengalaman yang selama ini tersembunyi di balik statistik.

Dari pemetaan ini, muncul sejumlah pola yang konsisten.

Pertama, **layanan dasar menunjukkan kemajuan, tetapi belum merata.** Masih terdapat rumah tangga yang hidup tanpa sanitasi layak, mengakses air minum tidak aman, dan menempuh jarak jauh untuk layanan kesehatan. Rumah tangga ini sering kali sekaligus menanggung anggota keluarga rentan, sehingga setiap gangguan layanan dasar berdampak berlapis.

Temuan pertama menunjukkan bahwa **kemajuan layanan dasar belum berarti kemajuan dalam keadilan akses.** Meski mayoritas rumah tangga memiliki rumah sendiri, listrik, dan toilet pribadi, di setiap kabupaten tetap muncul kelompok rumah tangga yang hidup tanpa sanitasi layak, mengandalkan sumber air tidak aman, dan harus menempuh jarak jauh untuk layanan kesehatan.

Yang menarik, kelompok ini hampir selalu merupakan rumah tangga dengan tanggungan berlapis—balita, lansia, orang dengan disabilitas, atau anggota keluarga dengan penyakit kronis. Artinya, setiap gangguan lingkungan akibat perubahan iklim tidak berdampak tunggal, melainkan memicu rangkaian kerentanan sekaligus.

Kedua, pada dimensi ekonomi, baseline mengungkap **paradoks kontribusi perempuan. Perempuan menjadi penyangga utama ekonomi rumah tangga dalam kondisi pendapatan yang rendah dan tidak stabil.** Mereka mengelola pengeluaran harian, menyesuaikan konsumsi saat harga naik, dan mencari penghasilan tambahan. Namun, semakin besar kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi keluarga, tidak selalu berarti semakin besar pula ruang mereka dalam pengambilan keputusan strategis terkait aset, lahan, atau pinjaman jangka panjang. Ketahanan ekonomi rumah tangga dibangun di atas kerja perempuan, tetapi kontrol atas sumber daya tetap timpang.

Ketiga, **beban kerja perempuan bersifat berlapis dan sebagian besar tidak tercatat dalam indikator ekonomi.** Baseline menunjukkan bahwa banyak perempuan bertanggung jawab atas beberapa kelompok rentan dalam satu rumah tangga sekaligus. Ketika bencana terjadi, kerja ini bertambah: membersihkan rumah pascabanjir, mengelola pengungsian informal, memastikan anak tetap bersekolah, dan memulihkan rutinitas keluarga. Yang menarik, kerja-kerja ini hampir tidak tercermin dalam indikator ekonomi atau kebijakan, padahal tanpa kerja tersebut, proses pemulihan hampir mustahil terjadi.

Keempat, **ketergantungan rumah tangga pada energi fosil masih sangat tinggi,** terutama LPG bersubsidi, dengan kayu bakar dan minyak tanah sebagai sumber cadangan. Energi terbarukan hampir tidak hadir dalam praktik domestik sehari-hari. Menariknya, ketika energi terbarukan muncul dalam percakapan masyarakat, ia lebih sering dipahami sebagai proyek eksternal di fasilitas umum—seperti proyek percontohan atau program bantuan sesaat—bukan sebagai solusi yang relevan bagi kebutuhan perempuan di rumah. Energi terbarukan jarang dibayangkan sebagai bagian dari dapur, ruang cuci, atau

aktivitas produktif rumahan. Ia hadir di ruang publik, tetapi belum masuk ke ruang hidup perempuan.

Kelima, **dampak perubahan iklim dan bencana dirasakan nyata, tetapi tingkat perlindungan tidak seragam.** Pengetahuan tentang evakuasi, kesiapsiagaan, dan keadilan distribusi bantuan berbeda antarwilayah. Ketika sistem formal tidak memadai, jaringan sosial, yang sering dimobilisasi oleh perempuan, menjadi penopang utama.

Sebuah keluarga sedang mempersiapkan masakan untuk acara pernikahan salah satu anggota keluarganya di Desa Dakuta, Kec Muara Batu, Aceh Utara. (Dok. ACCI USK)





Pembangkit Listrik Tenaga Air Kec Silih Nara, Aceh Tengah. (Dok. ACCI USK)

Apa yang Bisa Dilakukan dengan Baseline Data

Baseline data responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan **alat perubahan**. Ia membantu menggeser cara pandang dari kebijakan berbasis asumsi menuju kebijakan yang berpijak pada pengalaman nyata perempuan dan kelompok rentan. Dengan membaca bagaimana perempuan mengelola air, pangan, energi, perawatan, dan pemulihan pasca krisis, baseline data menyediakan dasar bukti untuk merancang

Lima Temuan Kunci Baseline Data Aceh

1.

Layanan dasar tersedia, tetapi timpang dan berdampak berlapis pada rumah tangga rentan.

2.

Perempuan menopang ekonomi keluarga, tetapi minim kuasa atas keputusan strategis.

3.

Beban kerja perawatan perempuan meningkat saat krisis, namun jarang tercatat.

4.

Rumah tangga bergantung pada energi fosil; energi terbarukan belum menjangkau ruang domestik.

5.

Jaringan sosial perempuan menutup celah sistem, tetapi tidak bisa menggantikan kebijakan.

program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih kontekstual dan relevan.

Lebih dari itu, baseline data membuka ruang untuk **mengoreksi arah kebijakan daerah**. Data tentang beban kerja perawatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi krisis iklim memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap lingkungan, tetapi juga adil secara sosial. Dengan demikian, kebijakan iklim

dan energi tidak lagi bersifat netral gender, melainkan secara sadar berpihak pada kelompok yang selama ini paling terdampak.

Dengan menautkan temuan-temuan lokal ke kerangka nasional seperti RAN GPI, baseline data berperan sebagai **jembatan antara kebijakan nasional dan realitas di tingkat tapak**. Data ini memastikan bahwa komitmen nasional tidak berhenti sebagai norma atau dokumen perencanaan, tetapi memiliki pijakan empiris yang kuat di daerah—sekaligus memberi umpan

Manfaat Baseline Data Responsif Gender

Baseline data responsif gender dapat digunakan untuk:

•

Merancang program iklim dan energi yang lebih tepat sasaran;

•

Menyusun kebijakan daerah yang berperspektif gender dan memahami kebutuhan kelompok rentan;

•

Menautkan kebutuhan lokal dengan kerangka kebijakan nasional;

•

Memastikan dasar pemantauan dan evaluasi yang akuntabel.

Data ini bukan akhir, tetapi titik awal perubahan

Secara keseluruhan, temuan baseline data di Aceh menegaskan bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang paling terdampak oleh kualitas layanan dasar, kebijakan iklim, dan kebijakan energi, tetapi juga pihak yang memiliki potensi memimpin perubahan, jika diberi ruang,

balik bagi penyempurnaan kebijakan di tingkat nasional.

Baseline data juga berfungsi sebagai **instrumen akuntabilitas**. Ia dapat digunakan sebagai rujukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai apakah kebijakan dan program iklim benar-benar mengurangi kesenjangan gender, atau justru memperkuatnya. Dengan baseline yang jelas, perubahan dapat diukur, dibandingkan, dan dipertanggungjawabkan—baik kepada masyarakat maupun kepada pembuat kebijakan.



Dialog antara kelompok perempuan Desa Dasan Geria dan Kepala Desa dalam membahas pengelolaan air bersih. Pertemuan ini mencerminkan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. (Dok. Gema Alam)

dukungan, dan pengakuan yang memadai. Pembelajaran dari Aceh menunjukkan bahwa membaca pengalaman perempuan melalui data adalah langkah penting untuk merancang jalan perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan, dari tingkat rumah tangga hingga kebijakan nasional.



Diskusi awal mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan dalam pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim. (Dok. WRI)

Dari Pengalaman Lapangan menuju Ruang Dialog Kebijakan

Sebagai bagian dari upaya menjembatani pengalaman lapangan dengan proses perumusan kebijakan, Women Research Institute, melalui program EmPower menyelenggarakan tiga kegiatan *Roundtable Discussion* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Forum-forum ini menghadirkan perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, serta kelompok perempuan dan komunitas dampingan program. *Roundtable Discussion* dirancang sebagai ruang dialog setara untuk

mendiskusikan kerangka kebijakan gender dan perubahan iklim, dengan bertolak dari bukti empiris, temuan baseline data, serta pengalaman konkret perempuan dalam mendampingi dampak krisis iklim di tingkat tapak.

Ruang diskusi ini tidak hanya membuka ruang pertukaran perspektif antar aktor, tetapi juga mendorong proses pembelajaran bersama mengenai tantangan, celah, dan peluang penguatan kebijakan iklim yang responsif gender. *Roundtable Discussion* menjadi medium strategis

untuk merumuskan refleksi kritis atas kebijakan yang ada, sekaligus menyusun rekomendasi awal bagi penguatan kerangka Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) agar lebih inklusif, kontekstual, dan berakar pada realitas perempuan dan kelompok rentan di lapangan.

Temuan dan dinamika yang mengemuka dalam rangkaian *Roundtable Discussion* menunjukkan bahwa meskipun inisiatif dan praktik baik terkait kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim telah berkembang di berbagai tingkat, masih terdapat fragmentasi kebijakan dan kesenjangan koordinasi antar aktor. Perbedaan kapasitas, pemahaman, serta mandat kelembagaan kerap

membuat isu gender dan perubahan iklim berjalan secara terpisah. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan sebuah kerangka kebijakan nasional yang terpadu dan lintas sektor menjadi semakin mengemuka.

Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) hadir sebagai upaya strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. RAN GPI memberikan arah bersama bagi integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program perubahan iklim, sekaligus menegaskan peran perempuan bukan hanya sebagai kelompok terdampak, tetapi sebagai aktor kunci dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.



Dialog berlanjut dengan memperdalam isu koordinasi lintas sektor dan penguatan kerangka regulasi, termasuk dorongan terhadap RAN-GPI. (Dok. WRI)

Pentingnya kebijakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI)

Permasalahan-permasalahan ini menegaskan bahwa perubahan iklim tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan gender yang sudah ada. Karena itu, kebijakan iklim yang responsif gender, seperti RAN GPI, menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya dilindungi dari dampak krisis iklim, tetapi juga diakui dan diperkuat sebagai aktor utama dalam solusi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) dilakukan dengan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan analisis hukum, sosiologi, politik, ekonomi, dan gender.

Tinjauan Sosiologis Perempuan dan Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi dampak perubahan iklim yang sangat kompleks, mulai dari bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan, badai), degradasi lingkungan, hingga kenaikan muka air laut (WRI, 2025). Perempuan menanggung beban paling berat akibat kondisi ini karena ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang ada. Data Susenas 2022 menunjukkan bahwa 9,65% perempuan hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi dibanding laki-laki 9,29% (BPS, 2022; WRI, 2025).

Secara sosiologis perubahan iklim berdampak pada perempuan karena:

- 1. Perempuan dan kelompok rentan adalah pihak paling terdampak perubahan iklim.
- 2. Ketimpangan akses struktural (tanah, energi, ekonomi, keputusan) memperburuk kerentanan mereka.
- 3. Perempuan memiliki kapasitas adaptasi berbasis pengetahuan lokal yang terbukti efektif, tetapi belum diakui negara.
- 4. Regulasi formal diperlukan agar paradigma berubah: dari melihat perempuan hanya sebagai “korban” menuju pengakuan mereka sebagai aktor kunci pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Ketidaksetaraan Struktural

Perempuan berkontribusi signifikan dalam pertanian (40% tenaga kerja), namun hanya 18–20% yang memiliki hak kepemilikan tanah (FAO, 2021; KPPPA & KLHK, 2024). Bias kebijakan perhutanan sosial yang menetapkan “kepala keluarga laki-laki” memperkuat eksklusi perempuan, sehingga akses mereka terhadap kredit, teknologi, dan program pemerintah terbatas (ICEL, 2025).

Dalam sektor energi, perempuan merupakan pengguna utama energi rumah tangga (biomassa, minyak tanah, gas), tetapi hampir tidak terwakili dalam kebijakan transisi energi. Kondisi ini memperlihatkan adanya “transisi yang tidak adil” jika perspektif gender tidak diarusutamakan (WRI, 2025).



Pertemuan ketiga menegaskan pentingnya kolaborasi dan integrasi kebijakan, sebagai langkah menuju penguatan implementasi yang lebih sistemik dan berkelanjutan. (Dok. WRI)

Dampak Sosial-Ekonomi

Dari hasil *Roundtable Discussion* yang diselenggarakan WRI pada 4 Juni 2025, 19 Juni 2025, dan 18 Juli 2025, dapat dirumuskan bahwa; Persoalan perempuan dan perubahan iklim yang berhasil dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman lapangan mulai dari NTB, NTT, hingga Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Jakarta, dan bisa kita lihat juga terjadi di wilayah lainnya di Indonesia menunjukkan pola kerentanan yang seragam seperti:

- **Beban ganda:** perempuan harus mengurus keluarga sekaligus mencari sumber ekonomi baru saat terjadi gagal panen atau kerusakan ekosistem.
- **Kehilangan sumber ekonomi:** proyek-proyek ekstraktif dan bencana iklim merampas ruang hidup dan lahan perempuan, memaksa mereka menjadi buruh migran.
- **Risiko kekerasan berbasis gender (KBG):** tekanan ekonomi memicu KDRT, kekerasan

seksual, bahkan TPPO di wilayah seperti NTT dan NTB.

- **Eksklusi dari keputusan:** perempuan jarang dilibatkan dalam konsultasi kebijakan, baik terkait proyek iklim maupun tata kelola hutan.

Kasus konkret misalnya di Timbulloko, Demak, banjir rob permanen sejak 2010 membuat perempuan terpaksa beralih menjadi nelayan dan mengalami penelantaran ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga (Nurhayati et al., 2023). Di Kalimantan Timur, perempuan harus berjalan jauh mencari air bersih, meningkatkan risiko kekerasan seksual. Sementara di Papua, perempuan di Mimika Timur terpaksa bermigrasi akibat limbah tambang, yang menambah kerentanan mereka terhadap trafficking.

Kerentanan Multidimensi

Perempuan adat, orang dengan disabilitas, anak-anak, dan lansia menghadapi risiko berlapis. Masyarakat hukum adat (MHA) misalnya, terancam kehilangan tanah dan cara hidup

tradisional akibat deforestasi dan iklim ekstrem. Orang dengan disabilitas yang bekerja di sektor informal kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki akses pada asuransi pertanian maupun nelayan. Anak-anak mengalami hambatan pendidikan karena krisis pangan dan air, sedangkan lansia lebih rentan terhadap dampak kesehatan (Bappenas, 2025).

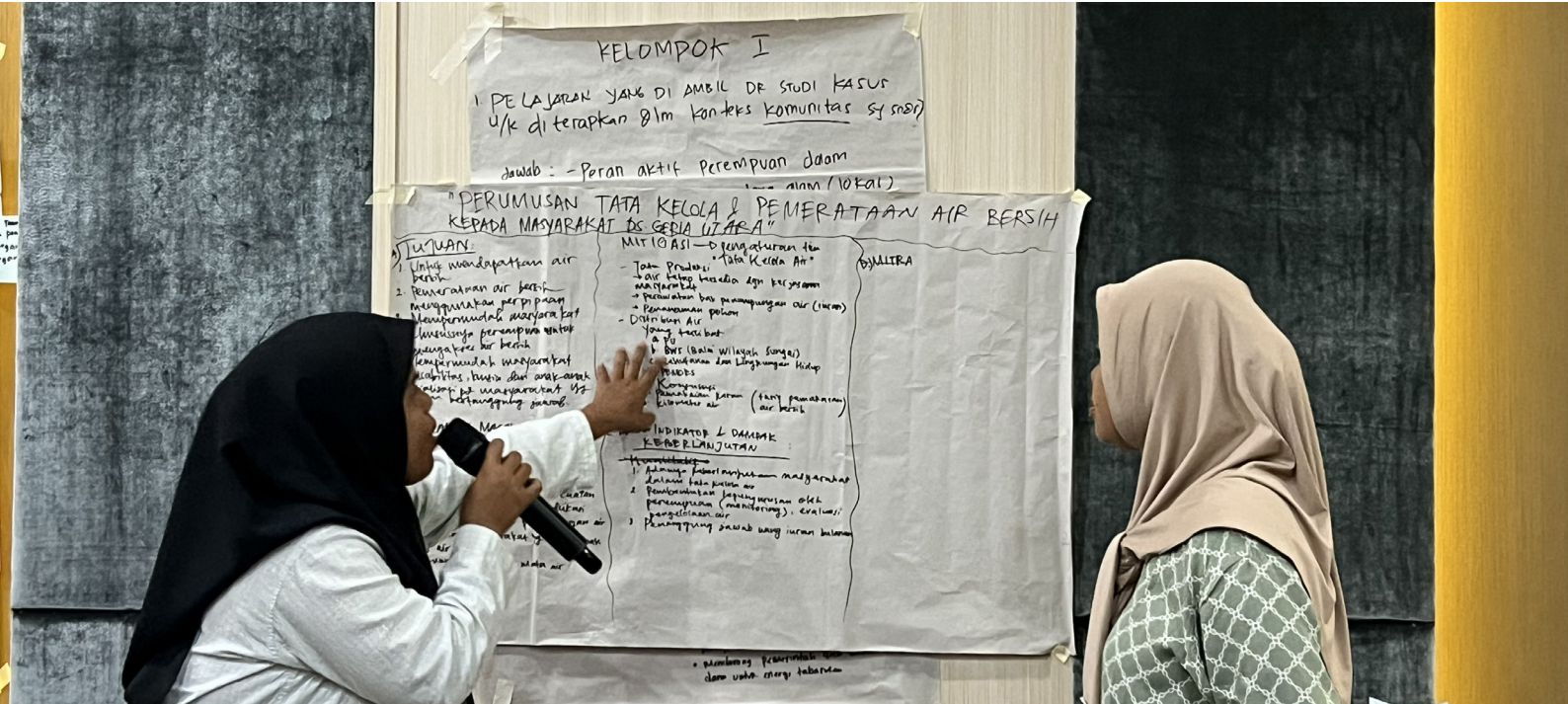
Panas Ekstrem sebagai Risiko Sosial Baru
Fenomena panas ekstrem di perkotaan telah meningkatkan risiko kesehatan, beban kerja perempuan, serta memperburuk ketidakadilan akses ruang terbuka hijau dan air bersih. RAN-GPI 2024–2030 mencatat dampak panas ekstrem pada kesehatan ibu dan bayi, risiko komplikasi perinatal, dan kesehatan mental ibu. Temuan Roundtable Discussion WRI juga menegaskan bahwa pekerja perempuan

sektor informal (misalnya pedagang kaki lima dan buruh pasar) sangat rentan terhadap penyakit akibat panas karena bekerja di ruang terbuka tanpa perlindungan sosial.

Perempuan sebagai Agen Perubahan
Meskipun rentan, perempuan terbukti menjadi agen adaptasi iklim. Studi KEHATI mencatat forum perempuan di Manggarai, Flores Timur, dan Lembata mampu memobilisasi Rp 338 juta untuk konservasi air dan pangan lokal (KEHATI, 2025). WALHI juga menyoroti praktik perempuan di pedesaan yang memimpin konservasi air dan pangan berbasis komunitas.

Namun, partisipasi mereka masih sering bersifat simbolis sehingga diperlukan partisipasi bermakna perempuan secara formal dalam pembuatan kebijakan nasional.

Perempuan Desa Dasan Geria memaparkan hasil pemetaan iklim berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka dalam menghadapi krisis air. (Dol. WRI)



Menjawab Tantangan RAN GPI: Dari Kelembagaan hingga Kepastian Hukum

Diskusi dalam pertemuan Roundtable WRI juga menggarisbawahi bahwa keberadaan kebijakan, betapapun penting dan progresifnya, tidak serta merta menjamin perubahan di tingkat implementasi. RAN GPI dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan kelembagaan, kesenjangan pengetahuan dan data, hingga norma dan budaya yang membayasi partisipasi bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan iklim

Dalam kedudukannya saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mendapat mandat untuk mengkoordinasi Rencana Aksi Nasional, Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI). Surat Keputusan Menteri KPPA tentang RAN-GPI menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, tidak memiliki daya ikat lintas sektor dan daerah, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen sukarela. Kedua, rentan diabaikan karena tidak bersifat memaksa, menjadikannya kurang prioritas dibanding agenda lain. Ketiga, tidak menjadi acuan formal dalam perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi, sehingga anggaran untuk program iklim responsif gender tidak terjamin. Keempat, tidak mampu mengisi kekosongan hukum dalam kebijakan sektoral iklim yang masih netral gender, seperti NEK, REDD+, PRK/LCDI, pajak karbon, dan bursa karbon. Dengan beberapa keterbatasan

tersebut diatas maka penguatan Surat Keputusan Menteri KPPPA tentang RAN-GPI perlu mendapat penguatan Peraturan Presiden. Melalui Keputusan Presiden maka RAN-GPI akan memperoleh kedudukan sejajar dengan strategi nasional lain. Pelaksanaannya akan mengikat seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aktor non-negara. Alokasi anggaran, koordinasi kelembagaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis indikator terpilah akan lebih terjamin. Perpres RAN-GPI juga akan menjadi instrumen hukum penghubung untuk memastikan bahwa kebijakan iklim sektoral tidak hanya berfokus pada penurunan emisi, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan iklim dan kesetaraan gender sesuai mandat konstitusi, undang-undang nasional, dan komitmen internasional.

Tantangan RAN GPI di Tataran Kebijakan dan Kelembagaan

Saat ini, kedudukan RAN GPI masih berada pada level keputusan menteri, sehingga belum memiliki daya ikat lintas sektor dan daerah. Konsekuensinya, implementasi RAN GPI sangat bergantung pada komitmen sukarela masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam praktik, kondisi ini membuat RAN GPI belum menjadi rujukan formal dalam perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi kebijakan iklim.

Ketiadaan payung hukum yang lebih kuat juga menyebabkan RAN GPI belum mampu mengisi kekosongan perspektif gender dalam berbagai kebijakan iklim sektoral, seperti kebijakan Nilai Ekonomi Karbon, REDD+, pembangunan rendah karbon, pajak karbon, dan bursa karbon. Akibatnya, agenda iklim berisiko tetap berjalan dengan pendekatan yang netral gender, meskipun dampak dan manfaatnya dirasakan secara berbeda oleh perempuan dan kelompok rentan.

Tantangan RAN GPI pada Pengetahuan, Data, dan Budaya



Pemetaan partisipatif menjadi bagian dari proses diskusi untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan dalam pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim. (Dok. Gema Alam)

Selain aspek kelembagaan, tantangan implementasi RAN GPI juga berakar pada rendahnya pemahaman tentang keterkaitan antara gender dan perubahan iklim, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun pelaksana teknis di lapangan. Isu gender kerap dipandang sebagai tambahan, bukan sebagai bagian integral dari strategi iklim.

Minimnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan faktor interseksionalitas lainnya memperlemah pengambilan keputusan berbasis bukti. Di saat yang sama, norma sosial dan budaya patriarkal masih membatasi partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam inisiatif iklim, meskipun pengalaman lapangan, seperti yang ditunjukkan oleh Program EmPower, membuktikan kapasitas perempuan sebagai aktor kunci perubahan.

Penguatan Kerangka Regulasi: Dari Kebijakan ke Kepastian Hukum

Pembelajaran dari lapangan menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim telah berjalan di berbagai wilayah, namun masih sangat bergantung pada komitmen lokal dan inisiatif program. Agar praktik-praktik tersebut dapat berkelanjutan, diperluas, dan direplikasi secara sistemik, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dan mengikat. Dalam konteks ini, penguatan RAN GPI melalui kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

Berdasarkan hasil *Roundtable Discussion* yang diselenggarakan oleh Women Research Institute dalam kerangka Program EmPower, terdapat beberapa model kebijakan yang dapat saling melengkapi untuk memperkuat pelaksanaan RAN GPI, yaitu:

1. **Peraturan Presiden (PerPres)** sebagai kerangka nasional yang mengikat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sekaligus menetapkan mandat

kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta sistem pelaporan yang jelas.

2. **Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Menteri** untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga, serta mendorong penyusunan dan penyalarsan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI).
3. **RAD-GPI di tingkat provinsi/kabupaten/kota** sebagai instrumen implementasi yang kontekstual dengan kondisi lokal, sektor prioritas daerah, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Melalui kombinasi kerangka regulasi tersebut, RAN GPI akan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan strategi nasional lainnya dan memiliki daya ikat yang lebih kuat dalam pelaksanaannya. Penguatan ini memungkinkan integrasi RAN GPI ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, memperjelas koordinasi kelembagaan, serta menjamin mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis indikator terpilah yang akuntabel.

Lebih jauh, penguatan kerangka regulasi RAN GPI akan menempatkannya sebagai instrumen hukum penghubung yang memastikan bahwa kebijakan iklim sektoral tidak hanya berfokus pada penurunan emisi, tetapi juga secara konsisten menegakkan prinsip keadilan iklim dan kesetaraan gender sesuai mandat konstitusi, undang-undang nasional, dan komitmen internasional.

Dukungan Pendanaan dan Tata Kelola yang Responsif Gender

Keberhasilan implementasi RAN GPI juga sangat ditentukan oleh ketersediaan pendanaan yang responsif gender. Tanpa integrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional maupun daerah, inisiatif iklim berbasis perempuan akan terus bergantung pada proyek jangka pendek.

Penguatan tata kelola pendanaan, termasuk pemanfaatan skema pembiayaan iklim dan dukungan mitra pembangunan, menjadi peluang untuk memastikan bahwa aksi iklim yang dipimpin perempuan memperoleh dukungan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional.

Modal Sosial dan Komitmen Internasional sebagai Penguat

Indonesia memiliki modal sosial dan politik yang signifikan untuk memperkuat RAN GPI. Komitmen internasional seperti *Paris Agreement*, *CEDAW*, *Beijing Platform for Action*, dan *Lima Work Programme on Gender* di bawah UNFCCC memberikan landasan normatif yang jelas bagi pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim.

Di tingkat nasional, praktik baik dari program-program berbasis komunitas, termasuk EmPower, menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang dan dukungan, aksi iklim dapat berjalan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Modal ini menjadi pengungkit penting untuk mendorong transformasi RAN GPI dari kebijakan koordinatif menjadi instrumen perubahan yang nyata.



Ruang belajar bersama membantu perempuan memahami perubahan nira, lingkungan, dan keterkaitannya dengan pangan, ekonomi, serta keberlanjutan desa. (Dok. Gema Alam)

Praktik Baik Negara Lain

Pengalaman negara-negara lain di kawasan Global South menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim dapat memperkuat ketahanan komunitas:

- Filipina telah mengintegrasikan *Gender and Climate Change Framework Strategy* sejak 2013, yang mewajibkan setiap program adaptasi dan mitigasi memasukkan analisis gender. Hasilnya, program community-based disaster risk reduction berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam sistem peringatan dini bencana dan menurunkan angka kematian saat topan (Villanueva, 2010)
- Bangladesh berhasil mengembangkan *Cyclone Preparedness Programme* yang melibatkan 50% perempuan relawan. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan secara signifikan menurunkan

angka kematian perempuan dan anak saat siklon, yang sebelumnya jauh lebih tinggi dibanding laki-laki (Alam & Collins, 2010).

- India, melalui program *Self-Employed Women's Association (SEWA)*, membangun skema asuransi mikro dan koperasi energi terbarukan berbasis komunitas. Program ini terbukti mengurangi kerentanan perempuan pekerja informal terhadap krisis iklim sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga (Chen, 2008)
- Fiji dan Vanuatu sebagai negara kepulauan Pasifik telah mengadopsi *gender-responsive climate resilience plans* yang memastikan akses perempuan ke dana iklim internasional serta mendorong kepemimpinan perempuan dalam forum adaptasi berbasis komunitas (United Nations Women, 2016)

Kerangka *Monitoring, Evaluation, Learning (MEL)* Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim



Melalui pendekatan partisipatif, pengalaman dan data lapangan dikumpulkan untuk memperkuat proses monitoring dan evaluasi kebijakan. (Dok. WRI)

Keberhasilan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan program, tetapi juga oleh kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memaknai

perubahan yang dihasilkannya. Dalam konteks kebijakan berskala nasional dan lintas sektor seperti RAN GPI, kerangka ***Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL)*** menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa capaian yang diukur tidak berhenti pada angka statistik semata, melainkan mencerminkan perubahan nyata dalam kehidupan perempuan dan kelompok rentan.

Kerangka MEL RAN GPI membuka ruang untuk memahami dampak secara lebih utuh, dengan menggabungkan data kuantitatif dan pembelajaran kualitatif, serta menangkap kompleksitas proses perubahan sosial yang berlangsung dalam skala besar. Dengan pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran dan perubahan transformatif, MEL tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai mekanisme refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan gender dan perubahan iklim.

Di Balik Angka Statistik Ada Situasi Nyata

Semua proyek pembangunan memiliki tonggak capaian dan target yang menjadi panduan program untuk mencapai dampak yang diharapkan. Di balik setiap angka statistik

terdapat kehidupan manusia dan realita nyata yang sedang terjadi.

Organisasi perempuan di Indonesia memiliki fokus, keyakinan, dan metode kerja yang beragam. Namun, seluruh organisasi perempuan memiliki satu kesamaan: keinginan untuk mentransformasi kehidupan perempuan Indonesia menjadi lebih baik.

RAN-GPI: Peluang untuk Perubahan Transformatif

Keberadaan RAN-GPI bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil dari kerja keras tak terhitung para pejuang sosial, penggerak perubahan, dan advokat yang terus berupaya mengangkat kehidupan perempuan dan kelompok marjinal di tengah krisis iklim yang semakin memburuk.

Cakupan RAN-GPI melintasi hampir seluruh kementerian di Indonesia serta menjangkau seluruh tingkatan tata kelola pemerintahan. Sebagian besar program pembangunan biasanya hanya mampu memengaruhi satu atau dua aspek kehidupan kelompok sasaran. Sangat sedikit yang mampu memberikan dampak lintas aspek kehidupan. Sebelum RAN-GPI, belum ada inisiatif yang mampu memengaruhi hampir seluruh dimensi kehidupan perempuan dan komunitas marjinal.

Dengan cakupan yang dimiliki RAN-GPI, inisiatif ini menjadi peluang terbaik bagi para pejuang hak perempuan dan kelompok marjinal untuk mendorong perubahan yang benar-benar transformatif.



Pengalaman sehari-hari mengolah nira mendorong perempuan membawa isu perlindungan aren dan pangan lokal ke ruang dialog dan perencanaan desa. (Dok. Gema Alam)

Skala Besar Membawa Kompleksitas

Cakupan RAN-GPI sangat luas dan menuntut kerja sama banyak Kementerian untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, bahkan sebelum melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga multilateral. Skala yang besar ini membawa harapan dan antusiasme, namun sekaligus menghadirkan tantangan dan kompleksitas yang tidak kecil.

Tujuan eksplisit RAN-GPI adalah mendukung Indonesia dalam memenuhi berbagai komitmen pembangunan internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan *Enhanced Nationally Determined Contributions* (eNDCs). Oleh karena itu, target-target RAN-GPI disusun dengan mempertimbangkan komitmen-komitmen tersebut.

Namun, mewujudkan perubahan transformatif bukan hal sederhana. Interaksi antara identitas sosial seseorang dan berbagai persoalan sosial tidak bersifat aditif, melainkan multiplikatif.

Perubahan nyata dalam kehidupan tidak akan tercapai jika hanya satu isu di satu sektor yang ditangani. Pendekatan harus bersifat interseksional, karena manusia juga bersifat interseksional.

Menetapkan target dalam program pembangunan membutuhkan ketelitian yang tinggi, demikian pula dalam pemantauan dan evaluasi dampak. RAN-GPI menggunakan komitmen internasional Indonesia sebagai rujukan perubahan, namun masih terdapat dua hal utama yang bisa diperkuat: ketersediaan data berkualitas tinggi dan kerangka *Monitoring, Evaluation, and Learning* (MEL) tingkat nasional yang terpadu.

Data dan Monitoring Evaluation and Learning (MEL)

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar karena keterbatasan pengetahuan mengenai persoalan yang dihadapi perempuan dan kelompok marjinal, besarnya persoalan tersebut, serta kekuatan sosial yang melatarbelakanginya. Akademisi dan organisasi masyarakat sipil telah bekerja keras mengumpulkan data, namun jangkauan dan sumber daya mereka sangat terbatas. Kementerian pemerintah pun memiliki keterbatasan serupa, ditambah kondisi geografis Indonesia yang menantang. Kekurangan informasi ini membuat penargetan kegiatan proyek dan intervensi sosial menjadi kurang presisi.

Saat ini, RAN-GPI dirancang melalui tujuh sektor dan lima area prioritas, dengan target dan indikator MEL yang terbatas pada sektor dan aktivitas tersebut. Komitmen internasional memang sangat penting, namun tujuan utama

seharusnya bukan sekadar memenuhi komitmen tersebut, melainkan mentransformasi kehidupan perempuan dan kelompok marjinal secara nyata. Oleh karena itu, KPPPA perlu memiliki kerangka MEL payung yang mengikat seluruh sektor dan berfokus pada perubahan transformatif.

Untuk menjawab dua kebutuhan tersebut, WRI mengusulkan **Qualitative Impact Protocol (QuIP)**.

Qualitative Impact Protocol (QuIP) untuk RAN-GPI

Qualitative Impact Protocol (QuIP) merupakan kerangka MEL yang mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk memahami perubahan yang terjadi dalam kehidupan penerima manfaat program.

Pertanyaan dalam wawancara dan FGD bersifat terbuka, dengan tujuan menggali bagaimana penerima manfaat memaknai kondisi hidup mereka serta apakah perubahan benar-benar dirasakan. Pendekatan inilah yang memungkinkan kita memastikan terjadinya perubahan transformatif yang nyata. Cerita dan narasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan *Thematic Coding* untuk menghasilkan *Causal Maps*, yaitu visualisasi hubungan sebab-akibat antara persoalan dan intervensi.

Sifat eksploratif QuIP memungkinkan pengumpulan cerita perubahan sekaligus menghasilkan data responsif gender yang sangat dibutuhkan untuk memperkaya desain dan pelaksanaan program.



Pengetahuan lokal aren dipraktikkan kembali oleh perempuan agar tidak hilang dan tetap hidup. (Dok. Gema Alam)

Kami memilih QuIP karena tiga alasan utama:

1. Sebagian besar indikator dan target MEL RAN-GPI masih berbasis kuantitatif.
2. QuIP memungkinkan pelaksanaan riset bersamaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.
3. QuIP menempatkan narasi perempuan dan kelompok marjinal sebagai pusat analisis.

Empat Tahapan QuIP

1. **Pengumpulan Data**
Wawancara dan FGD dengan penerima manfaat difokuskan pada Impact Domains agar narasi tetap terarah pada perubahan kehidupan.
2. **Pemilihan Kasus (Sampling)**
Sampel ditentukan berdasarkan kesamaan interseksionalitas, sehingga cerita dapat dikompilasi dan digeneralisasi secara hati-hati.
3. **Analisis Data**
Analisis data kualitatif dan Thematic Coding digunakan untuk menyusun Causal Maps dan memahami pengalaman perempuan dan kelompok marjinal secara lebih mendalam.
4. **Pemeriksaan Silang (Cross-Checking)**
Narasi kausal yang dihasilkan dibandingkan dengan data kuantitatif dari kerangka MEL sektoral.

Domain Dampak dan Sektor RAN-GPI

Karena implementasi RAN-GPI dibagi ke dalam sektor-sektor untuk memudahkan koordinasi

lintas kementerian, kerangka payung yang berorientasi pada perubahan menjadi sangat penting. Fokus utama kerangka ini adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menentukan perubahan yang ingin dicapai, fokus diberikan pada cara krisis iklim memperburuk persoalan sosial yang dihadapi perempuan dan kelompok marjinal. Perubahan tersebut meliputi:

- **Dukungan Struktural:** dampak kebijakan publik, layanan, dan inisiatif terhadap kehidupan perempuan.
- **Akses dan Agensi:** kemampuan dan kapasitas perempuan untuk mengakses ruang pengambilan keputusan, pendidikan, penguatan kapasitas, alat ekonomi dan keuangan, serta pengakuan dan perlindungan hukum.
- **Pengetahuan dan Perencanaan:** pemahaman komunitas atas kerentanan sosial dan iklim, kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut untuk perencanaan

bersama, serta pelestarian dan pemanfaatan pengetahuan lokal/tradisional.

- **Kemiskinan dan Perlindungan Sosial:** kemiskinan sebagai dampak utama krisis iklim serta efektivitas dan kebutuhan sistem perlindungan sosial.
- **Kesehatan Ibu dan Komunitas:** kondisi kesehatan sebagai indikator berbagai faktor sosial, termasuk peran perempuan dalam menjaga kesehatan rumah tangga.

Pendekatan MEL ini dapat menantang asumsi program, memperkaya replikasi dan skala program, serta memastikan potensi transformatif RAN-GPI dimaksimalkan.

Refleksi Temu Nasional: Pentingnya Transformasi Ekonomi, Kolaborasi, dan Sistem Pembiayaan untuk Keadilan Iklim

Women Research Institute (WRI) bersama UN Women telah melaksanakan program kepemimpinan perempuan dalam aksi perubahan iklim melalui Program EmPower II. Program ini dilaksanakan di delapan desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melibatkan lebih dari 300

perempuan selama 18 bulan. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, WRI bersama UN Women kemudian melakukan refleksi atas pelaksanaan program tersebut melalui sebuah forum Temu Nasional.

Forum Temu Nasional ini dihadiri oleh sekitar 160 peserta dan menjadi ruang reflektif yang



Para peserta Pertemuan Nasional tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim, yang mempertemukan beragam pemangku kepentingan untuk merefleksikan berbagai jalur menuju keadilan iklim di Indonesia. (Dok. UN Women)

mempertemukan beragam aktor yakni pemerintah, masyarakat sipil, komunitas, akademisi, dan mitra Pembangunan, untuk melihat kembali arah dan tantangan kepemimpinan perempuan dalam mendorong keadilan iklim di Indonesia.

Dari forum ini, muncul satu benang merah yang kuat: upaya aksi iklim yang berkeadilan tidak dapat berdiri sendiri sebagai program atau intervensi sektoral. Ia perlu ditopang oleh sistem yang mampu memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan dampak jangka panjang.

Refleksi dari Temu Nasional mengerucut pada tiga pilar utama yang saling terkait—ekonomi, kolaborasi, dan sistem pembiayaan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang penting dalam menentukan aksi iklim di tingkat lokal agar berkembang dari inisiatif terbatas menjadi perubahan sistemik.

1. Ekonomi sebagai Landasan Aksi Iklim dan Kepemimpinan Perempuan

Dalam diskusi Temu Nasional, para peserta secara konsisten menyoroti bahwa perubahan iklim semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampaknya hadir dalam berbagai bentuk, seperti semakin terbatasnya akses air, ketidakpastian hasil panen, meningkatnya biaya hidup, serta degradasi sumber daya alam.

Dalam situasi tersebut, rumah tangga menjadi ruang pertama di mana tekanan akibat perubahan iklim dirasakan secara langsung. Perempuan kerap berada di pusat dinamika ini, karena peran mereka dalam mengelola kebutuhan

dasar keluarga dan menjaga keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Temu Nasional juga menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam aksi



Diskusi panel dalam Pertemuan Nasional yang menyoroti peran kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan ekonomi dalam mendorong aksi iklim. (Dok. UN Women)

iklim tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi. Para peserta menekankan bahwa perempuan, sebagaimana pemimpin lainnya, membutuhkan akses terhadap sumber daya yang memadai—termasuk akses terhadap pendanaan, informasi, kapasitas, dan jejaring agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Tanpa dukungan tersebut,

kontribusi perempuan dalam mendorong aksi iklim berisiko tetap terbatas pada level domestik dan belum sepenuhnya terhubung dengan perubahan yang lebih sistemik.

Perempuan menjadi pihak yang harus memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi dalam kondisi yang tidak pasti. Mereka menyesuaikan pola konsumsi keluarga, mencari

alternatif sumber pangan, mengatur penggunaan air, dan mengembangkan strategi bertahan yang kerap tidak dikenali sebagai “aksi iklim”. Dari pengalaman ini terlihat bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak, melainkan juga aktor yang aktif merespons, mengelola, dan menjaga keberlangsungan kehidupan di tengah krisis.

Gambaran Utama di Lapangan

Di banyak wilayah, perubahan iklim dirasakan sebagai tekanan ekonomi sehari-hari melalui krisis air, ketidakpastian pangan, dan meningkatnya biaya hidup yang langsung membebani rumah tangga.

Dalam situasi ini, perempuan berada di garis depan—mengelola keterbatasan, menyesuaikan kebutuhan keluarga, dan mengembangkan strategi bertahan sebagai bentuk adaptasi nyata.

Dari pengalaman tersebut, ekonomi menjadi pintu masuk paling konkret yang tidak hanya merespons krisis, tetapi juga membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan dan menghubungkan kebutuhan sehari-hari dengan perubahan yang lebih luas.

Ketika perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi—baik melalui usaha produktif, pelatihan, akses pembiayaan, maupun pengelolaan sumber daya alam—terjadi perubahan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan politik. Perempuan tidak hanya merespons dampak krisis, tetapi mulai membentuk arah respons itu sendiri. Mereka memiliki ruang untuk mengambil keputusan, menentukan prioritas, dan mengorganisasi tindakan di tingkat komunitas. Transformasi ini tampak dalam perubahan peran

yang lebih luas. Perempuan yang sebelumnya lebih banyak dianggap berperan pada ruang domestik mulai diakui diruang publik. Mereka berpartisipasi dalam musyawarah desa, terlibat dalam perencanaan pembangunan, menginisiasi usaha berbasis komunitas, hingga ikut mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya. Banyak aktivitas ekonomi yang mereka kembangkan juga memiliki dimensi ekologis yang kuat, seperti pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, pengolahan limbah, atau usaha berbasis sumber daya lokal. Dengan



Diskusi panel dalam Pertemuan Nasional tentang kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim, menyoroti peran kolaborasi dalam mendorong transisi energi yang adil dan inklusif. (Dok. UN Women)

demikian, ekonomi tidak lagi hanya dipahami sebagai alat penghidupan, tetapi sebagai medium yang memperkuat ketahanan sekaligus membuka jalan bagi kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim.

Refleksi Temu Nasional juga menunjukkan bahwa transformasi ini masih rapuh. Berbagai inisiatif ekonomi berkembang pesat selama masa program karena ditopang oleh pelatihan, pendampingan, jejaring, dan dukungan pendanaan. Akan tetapi, ketika dukungan eksternal berakhir, banyak usaha mengalami stagnasi, kelompok mulai kehilangan daya

dorong, dan inovasi yang sebelumnya tumbuh tidak selalu mampu berlanjut.

Keberhasilan yang terlihat sering kali masih bergantung pada ekosistem eksternal yang menopangnya. Ketika dukungan tersebut berkurang atau berakhir, komunitas dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan inisiatif secara mandiri, sementara kapasitas dan dukungan di tingkat lokal belum sepenuhnya memadai.

Di titik inilah keterbatasan pendekatan berbasis program menjadi semakin jelas. Program memang mampu memicu perubahan, tetapi

tidak selalu mampu memastikan keberlanjutan perubahan tersebut setelah intervensi selesai.

Peningkatan kapasitas dan akses awal tetap merupakan langkah penting, namun tidak cukup apabila tidak diikuti dengan penguatan sistem yang lebih luas. Penguatan ini mencakup kebijakan dan regulasi yang mendukung, integrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, keberlanjutan akses terhadap sumber daya dan pendanaan, serta kelembagaan lokal yang mampu melanjutkan dan mengembangkan inisiatif yang telah dibangun.

Karena itu, tantangan utamanya bukan hanya bagaimana memulai perubahan, melainkan bagaimana memastikan perubahan tersebut terus hidup, berkembang, dan beradaptasi dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, penguatan ekonomi tidak dapat berhenti pada level individu

atau kelompok saja, tetapi perlu terhubung dengan sistem yang lebih luas—meliputi sistem pasar, sistem keuangan, kebijakan dan perencanaan publik, serta kelembagaan lokal. Dengan keterhubungan ini, inisiatif ekonomi perempuan tidak lagi berada pada skala kecil dan rentan, melainkan memiliki peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Tanpa keterhubungan semacam ini, banyak prakarsa perempuan akan tetap bertahan sebagai upaya lokal yang sporadis. Tetapi ketika dihubungkan dengan sistem yang lebih luas, prakarsa tersebut memiliki potensi untuk tumbuh, direplikasi, dan bahkan mempengaruhi arah pembangunan yang lebih inklusif. Dari sini terlihat bahwa ekonomi bukan hanya pintu masuk bagi aksi iklim, tetapi juga titik kritis yang menentukan apakah aksi tersebut dapat

Para mitra Program EmPower berkumpul dalam ruang kolaboratif, mencerminkan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam menghubungkan praktik lokal dengan perubahan sistemik yang lebih luas. (Dok. UN Women)



bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan bukan sekadar hasil sampingan dari program, melainkan bagian dari landasan perubahan yang perlu diperkuat secara terus-menerus.

2. Kolaborasi sebagai Jembatan antara Praktik Lokal dan Perubahan Sistemik

Jika ekonomi menjadi pintu masuk bagi perubahan, maka kolaborasi adalah jembatan yang menentukan sejauh mana perubahan itu



Dwi Yuliawati dari UN Women Indonesia menyampaikan sambutan pada Pertemuan Nasional, menekankan pentingnya menghubungkan berbagai inisiatif untuk mendorong aksi iklim yang lebih terintegrasi dan efektif. (Dok. UN Women)

dapat meluas dan bertahan. Tanpa kolaborasi, berbagai inisiatif—sekuat apa pun di tingkat lokal—akan tetap berjalan sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain, dan sulit mencapai

dampak yang lebih besar. Refleksi Temu Nasional menunjukkan dengan jelas bahwa transformasi menuju keadilan iklim tidak dapat dicapai oleh satu aktor saja.

Tantangan Nyata dalam Kolaborasi

Temu Nasional menunjukkan bahwa berbagai aktor telah bekerja cukup aktif dalam mendorong aksi iklim. Namun, banyak upaya masih berjalan secara paralel, bahkan dalam isu dan wilayah yang sama, tanpa keterhubungan yang kuat.

Isu gender dan perubahan iklim sering kali diproses secara terpisah, dengan koordinasi lintas sektor yang masih terbatas.

Yang dibutuhkan bukan hanya kerja bersama tetapi keterhubungan yang mampu mendorong perubahan sistemik

Setiap aktor memiliki kekuatan sekaligus keterbatasannya masing-masing. Pemerintah memiliki mandat kebijakan dan kewenangan anggaran, tetapi sering kali terbatas dalam menjangkau dinamika komunitas. Masyarakat sipil memiliki kedekatan dengan komunitas dan kemampuan membangun kepercayaan, namun tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup besar untuk menjamin keberlanjutan. Sektor swasta membawa peluang dalam pembiayaan, pasar, dan inovasi, tetapi belum selalu terhubung dengan agenda keadilan sosial dan gender. Sementara itu, komunitas memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman langsung, tetapi sering kali berada pada posisi yang paling terbatas aksesnya terhadap pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi bukan lagi pilihan tambahan, tetapi kebutuhan mendasar.

Refleksi Temu Nasional juga menegaskan bahwa kolaborasi yang ada saat ini masih jauh dari ideal. Banyak inisiatif berjalan secara paralel, bahkan di wilayah dan isu yang sama, tanpa keterhubungan yang kuat. Program dikembangkan dengan

pendekatan masing-masing, menggunakan data, indikator, dan logika kerja yang berbeda. Akibatnya, meskipun aktivitas yang dilakukan cukup banyak, dampak yang dihasilkan tidak selalu terakumulasi secara signifikan. Yang terjadi bukanlah kekurangan upaya, melainkan kekurangan keterhubungan.

Akar dari persoalan ini terletak pada fragmentasi dalam tata kelola. Isu gender dan perubahan iklim masih sering ditempatkan dalam ruang kebijakan yang terpisah, ditangani oleh institusi yang berbeda, dengan prioritas dan mekanisme kerja yang tidak selalu selaras. Di satu sisi, kebijakan iklim belum sepenuhnya responsif terhadap dimensi gender. Di sisi lain, kebijakan gender belum selalu memasukkan perubahan iklim sebagai bagian inti dari agenda pembangunan. Akibatnya, praktik-praktik baik yang berkembang di tingkat komunitas — termasuk prakarsa perempuan dalam pengelolaan sumber daya dan penguatan ekonomi lokal — tidak selalu terhubung dengan kebijakan yang lebih luas. Sebaliknya, kebijakan yang dirumuskan di tingkat

nasional atau daerah tidak selalu menjawab realitas yang dihadapi di lapangan.

Kolaborasi merupakan upaya membangun keterhubungan sistemik—menghubungkan aktor, kebijakan, sumber daya, pengetahuan, dan proses pengambilan keputusan dalam satu kerangka yang saling memperkuat. Dalam pengertian ini, kolaborasi bukan hanya soal siapa bekerja dengan siapa, tetapi bagaimana berbagai inisiatif yang berjalan dapat saling terhubung, terkoordinasi, dan mengisi satu sama lain, sehingga tidak lagi bergerak secara paralel tanpa keterkaitan yang jelas.

Salah satu landasan penting untuk membangun kolaborasi yang efektif adalah transparansi data. Data ini berfungsi sebagai bahasa bersama yang memungkinkan berbagai pihak memahami konteks, kebutuhan, serta dampak secara lebih

utuh.

Dengan data yang terbuka dan terintegrasi, para aktor yang terlibat dapat melihat keterkaitan antar intervensi. Hal ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan serta merancang strategi yang lebih terarah.

Selain data, kejelasan peran juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun kolaborasi yang efektif. Dalam ekosistem yang melibatkan banyak aktor, masing-masing pihak perlu memahami posisi, fungsi, dan kontribusinya terhadap tujuan bersama.

Dalam praktiknya, hal ini dapat diperkuat melalui mekanisme yang lebih terstruktur, seperti pemetaan peran dan mandat antar aktor, penyusunan kerangka kerja bersama (shared framework), serta forum koordinasi

Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender di KPPPA, menyampaikan pidato kunci yang menyoroti peran kolaborasi dalam mendorong kebijakan iklim yang responsif gender. (Dok. UN Women)



yang memungkinkan adanya penyelarasan secara berkala. Pendekatan ini juga telah banyak digunakan oleh lembaga filantropi dan mitra pembangunan untuk memastikan bahwa berbagai intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi.

Dengan kejelasan peran yang didukung oleh mekanisme tersebut, setiap aktor dapat bekerja secara lebih strategis—tidak hanya menjalankan programnya masing-masing, tetapi juga memahami bagaimana kontribusinya terhubung dan memperkuat keseluruhan upaya.

Lebih jauh lagi, kolaborasi juga menuntut perubahan dalam cara kerja kelembagaan. Integrasi tidak mungkin terjadi jika setiap sektor tetap bekerja dalam logika, bahasa, dan prosedurnya masing-masing. Diperlukan penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pembelajaran lintas sektor, agar intervensi yang dilakukan tidak hanya berjalan berdampingan, tetapi sungguh-sungguh saling menguatkan. Di sinilah kolaborasi menjadi jembatan menuju perubahan sistemik.

Ia membuka kemungkinan agar praktik-praktik lokal yang lahir dari kebutuhan nyata komunitas dapat diangkat menjadi bagian dari kebijakan. Sebaliknya, ia juga memungkinkan kebijakan yang ada menjadi lebih responsif dan kontekstual karena terhubung dengan pengalaman lapangan.

3. Sistem Pembiayaan Inklusif dan Berbasis Komunitas sebagai Dasar Keberlanjutan

Refleksi mengenai ekonomi dan kolaborasi dalam Temu Nasional mengarah pada satu pertanyaan kunci: bagaimana memastikan inisiatif aksi iklim dapat terus berlanjut setelah intervensi awal berakhir. Ketika dukungan pendanaan eksternal dari donor atau mitra pembangunan selesai, banyak inisiatif yang sebelumnya berjalan baik mengalami perlambatan, bahkan berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata pada ketersediaan dana, melainkan pada bagaimana sistem pembiayaan yang berkelanjutan dirancang sejak awal.

Selama pembiayaan masih diposisikan sebagai dukungan jangka pendek dari donor untuk

Akses Belum Tentu Setara

Perempuan, dalam banyak kasus sudah memiliki akses secara formal terhadap layanan keuangan. Akan tetapi, mereka belum tentu memiliki kontrol, kapasitas, atau ruang yang cukup untuk memanfaatkan akses tersebut secara optimal.

Hal ini dipengaruhi antara lain oleh norma sosial, keterbatasan informasi, dan minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Inklusi tidak dapat hanya dipahami sebagai “membuka akses”, tetapi harus mencakup dimensi yang lebih luas:

- kapasitas untuk memanfaatkan
- kontrol atas sumber daya
- posisi tawar dalam pengambilan keputusan



Katherine Hallyburton, mewakili Kedutaan Besar Selandia Baru, menyampaikan sambutan pembuka pada Pertemuan Nasional tentang kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim. (Dok. UN Women)

menjalankan program, keberlanjutan akan tetap menjadi persoalan. Sebaliknya, pembiayaan perlu dirancang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, yang menghubungkan berbagai sumber pendanaan—baik dari pemerintah daerah (melalui perencanaan dan penganggaran), sektor swasta, maupun mekanisme pembiayaan berbasis komunitas—dengan kebutuhan nyata di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan program, tetapi sebagai instrumen yang memperkuat ekonomi lokal, mendorong kolaborasi antar aktor, serta memperkuat tata kelola di tingkat komunitas dan daerah. Dengan pendekatan ini, aksi iklim memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Pergeseran dari pendekatan berbasis program menuju pendekatan berbasis sistem dengan demikian bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan cara pandang dalam merancang keberlanjutan.

Secara global, tantangan pembiayaan iklim bukan hanya terletak pada ketiadaan modal. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana modal tersebut dapat mengalir hingga ke tingkat yang paling membutuhkan. Berbagai hambatan struktural—seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, regulasi yang belum mendukung, akses pasar yang lemah, dan terbatasnya koneksi dengan sistem keuangan formal—membuat komunitas lokal sering kali tetap berada di luar jangkauan skema pembiayaan yang tersedia. Dalam konteks Indonesia, peluang untuk

menjembatani kesenjangan ini sebenarnya cukup terbuka. Strategi Nasional Keuangan Inklusif memberikan arah untuk memperluas akses pembiayaan secara lebih merata, sementara Dana Desa menyediakan sumber pendanaan publik yang bersifat rutin dan potensial untuk mendukung kegiatan terkait perubahan iklim.

Masuknya agenda desa adaptif perubahan iklim sebagai bagian dari prioritas pembangunan desa menunjukkan adanya pergeseran di tingkat kebijakan dan perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa mulai tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mengintegrasikan aspek ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan dalam agenda pembangunan.

Meski demikian, peluang ini belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Tantangan dalam kapasitas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta integrasi program di tingkat desa masih menjadi kendala yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber pembiayaan saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menghubungkan pembiayaan tersebut dengan kebutuhan nyata di tingkat komunitas.

Di sisi lain, sektor keuangan juga mulai bergerak ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan membuka peluang bagi pembiayaan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, termasuk usaha kecil di tingkat lokal. Perkembangan ini penting karena memungkinkan ekonomi komunitas mulai terhubung dengan sistem keuangan formal.

Namun demikian, refleksi Temu Nasional juga

menggarisbawahi bahwa akses terhadap sistem keuangan tidak secara otomatis berarti tercapainya inklusi yang setara. Tanpa desain yang responsif terhadap kebutuhan dan konteks kelompok rentan, termasuk perempuan, akses tersebut berpotensi tetap terbatas dan tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Perempuan sering kali tetap menghadapi hambatan dalam memanfaatkan layanan keuangan —baik karena keterbatasan informasi, norma sosial, posisi tawar yang lemah, maupun keterbatasan akses terhadap ruang pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin memiliki akses secara formal, tetapi tidak memiliki kontrol atau kapasitas yang cukup untuk memanfaatkannya secara optimal. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan inklusif tidak cukup dipahami sebagai pembukaan akses semata. Ia harus dirancang secara sadar untuk memastikan adanya kapasitas, kontrol, dan posisi tawar bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Tanpa itu, pembiayaan justru berisiko memperkuat ketimpangan yang telah ada.

Di sinilah pendekatan pembiayaan berbasis komunitas menjadi sangat relevan. Keberlanjutan aksi iklim di tingkat lokal tidak dapat bertumpu pada satu jenis pembiayaan, melainkan membutuhkan kombinasi berbagai instrumen yang saling melengkapi, sesuai dengan karakteristik kegiatan dan kebutuhan komunitas. Untuk kegiatan terkait barang publik — seperti perlindungan ekosistem, pengelolaan air, atau kesiapsiagaan bencana termasuk pembiayaan publik seperti Dana Desa tetap menjadi instrumen utama. Pembiayaan semacam ini penting karena

manfaat kegiatan tersebut tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi keuntungan finansial langsung, meskipun memiliki dampak sosial dan ekologis yang sangat luas.

Banyak inisiatif komunitas memiliki dimensi ekonomi yang kuat, seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, usaha berbasis sumber daya alam, penyediaan air bersih, atau energi terbarukan. Kegiatan-kegiatan seperti ini membutuhkan pendekatan pembiayaan yang berbeda — yang tidak hanya menopang keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sumber pendapatan.

Skema berbasis komunitas menjadi sangat penting dalam konteks ini. Kelompok simpan pinjam, koperasi, dan praktik keuangan lokal seperti arisan tidak hanya menyediakan akses terhadap dana, tetapi juga membangun solidaritas, kepercayaan, dan ruang belajar bersama. Bagi banyak perempuan, skema ini sering kali menjadi pintu masuk pertama untuk mengenal pembiayaan, mengembangkan usaha, dan memperkuat posisi ekonominya dalam komunitas. Dengan demikian, skema komunitas memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar instrumen keuangan: ia juga merupakan infrastruktur sosial.

Selain itu, kelembagaan ekonomi desa seperti BUM Desa memiliki potensi strategis sebagai penghubung antara aksi iklim dan sistem ekonomi yang lebih luas. Dengan mengelola usaha yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal — misalnya pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan, penyediaan air, atau energi

terbarukan — BUM Desa dapat menciptakan model usaha yang berkelanjutan secara finansial sekaligus berkontribusi pada ketahanan lingkungan. Di titik ini, pembiayaan mulai menjadi bagian dari pembangunan ekonomi desa, bukan lagi hanya dukungan proyek.

Banyak komunitas masih kesulitan mengakses pembiayaan formal karena keterbatasan aset, dokumen, atau profil usaha yang tidak sesuai dengan standar lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks ini, mekanisme berbagi risiko, skema pembiayaan fleksibel, dan pendekatan yang menyesuaikan kapasitas komunitas dapat membuka akses baru bagi mereka yang selama ini berada di pinggir sistem.

Pembiayaan tidak berjalan efektif tanpa kepercayaan. Dan, kepercayaan hanya dapat dibangun melalui transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Pengalaman di tingkat desa menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memang mulai meningkat, tetapi transparansi saja tidak cukup. Informasi harus dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Jika tidak, transparansi hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak benar-benar memperkuat akuntabilitas.

Partisipasi juga menjadi isu yang sangat menentukan. Dalam banyak kasus, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih belum merata, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Ketika partisipasi terbatas, maka distribusi manfaat dari pembiayaan juga cenderung tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola bukan sekadar urusan prosedur administratif, tetapi berkaitan langsung

dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Sistem yang tidak inklusif berisiko memperkuat ketimpangan, bahkan ketika dirancang dengan niat baik.

Dari keseluruhan refleksi ini, terlihat bahwa keberlanjutan aksi iklim bukan ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang tersedia,

melainkan oleh bagaimana ekonomi, kolaborasi, pembiayaan, dan tata kelola dihubungkan dalam satu sistem yang terintegrasi. Sistem itulah yang memungkinkan pengalaman lokal terhubung dengan kebijakan, kebutuhan komunitas bertemu dengan mekanisme pembiayaan, dan prinsip keadilan—termasuk kesetaraan gender—menjadi bagian dari cara pembangunan dijalankan.

Pesan Utama Temu Nasional	menguatkan.
Refleksi Temu Nasional menegaskan bahwa keberlanjutan aksi iklim tidak dapat ditopang oleh pendekatan berbasis proyek semata. Program dapat memicu perubahan, tetapi tidak selalu mampu menjaganya tetap berjalan.	Perubahan ini mencakup: • ekonomi lokal sebagai landasan • kolaborasi sebagai penghubung • pembiayaan sebagai penguat • tata kelola sebagai penentu
Yang dibutuhkan adalah pergeseran menuju sistem yang terintegrasi, di mana berbagai elemen saling terhubung dan saling	Pada akhirnya, keberlanjutan bukan ditentukan oleh seberapa besar dana yang tersedia, tetapi oleh seberapa kuat sistem yang dibangun untuk menopangnya.

Dengan demikian, aksi iklim di tingkat lokal tidak lagi diposisikan sebagai intervensi sementara, tetapi sebagai bagian dari arah pembangunan yang lebih luas. Kepemimpinan perempuan tidak lagi dilihat sebagai hasil dari program, melainkan sebagai elemen penting dalam transformasi sistem itu sendiri. Pada akhirnya,

keadilan iklim adalah tentang membangun jembatan—antara lokal dan nasional, antara komunitas dan kebijakan, antara kebutuhan hari ini dan keberlanjutan masa depan. Dan jembatan tersebut hanya dapat berdiri kokoh ketika ekonomi, kolaborasi, dan sistem pembiayaan bergerak dalam satu arah yang sama.

Penutup

Kepemimpinan perempuan dalam menghadapi krisis iklim tidak lahir dari jabatan formal. Ia tumbuh dari pengalaman hidup sehari-hari, dari keberanian untuk membaca perubahan, berbagi pengetahuan, dan mengorganisir tindakan kolektif.

Melalui tuturan pengalaman dan pengetahuannya ini, perempuan tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan iklim. Mereka mengubah cara desa memahami persoalan, merumuskan solusi, dan membayangkan masa depan. Air, limbah, dan pangan tidak lagi diperlakukan sebagai isu terpisah, melainkan sebagai satu lanskap kehidupan yang dirawat bersama.

Dokumentasi ini ingin menunjukkan dan memindahkan pengalaman perempuan dari pinggiran ke titik sentral, sebagai fondasi pengetahuan bagi pembangunan desa yang adil,

berkelanjutan, dan berpihak pada kehidupan.

Pengalaman perempuan menjadi penting untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan agar masuk kedalam kebijakan yang lebih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat agar pengalaman tersebut tidak hanya tercecer dan penderitaan perempuan di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan menjadi sia-sia atau disiasia kan.

Di tengah krisis iklim, perempuan membuka jalan perubahan. Perempuan telah menunjukkan bahwa mereka memimpin dalam melakukan adaptasi dan mitigasi. Kita – organisasi masyarakat sipil dan pemerintah – perlu mencari jalan untuk mendukung para perempuan dan kelompok rentan dengan mendengarkan apa yang mereka butuhkan.

